

# LAPORAN TAHUNAN PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2017



**Pusat Penyuluhan  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

## KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan (Pusluh) Tahun 2017 disusun sebagai pertanggungjawaban administratif Satuan Kerja Pusat Penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta DIPA Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2017.

Laporan ini memuat uraian tentang rencana kegiatan peningkatan penyuluhan, pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan baik fisik maupun keuangan, permasalahan serta saran tindak lanjutnya.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan peningkatan penyuluhan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Januari 2018  
Kepala Pusat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Siti Aini Hanum', written over a faint blue outline of a signature box.

Dra. Siti Aini Hanum, MA  
NIP. 19580207 198403 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II. ORGANISASI.....</b>	<b>4</b>
A. Tugas dan Fungsi.....	4
B. Organisasi.....	4
C. Sumber Daya Manusia.....	6
D. Sarana dan Prasarana.....	6
<b>BAB III. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis Pusat Penyuluhan .....	10
B. Rencana Kerja Tahun 2017.....	12
C. Rencana Kinerja/RKAKL.....	14
<b>BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2017.....</b>	<b>16</b>
A. Pelaksanaan Anggaran .....	16
B. Pelaksanaan Fisik Kegiatan.....	17
C. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut.....	63
D. Rekomendasi.....	64
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Manusia Pusat Penyuluhan .....	5
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Pusat Penyuluhan .....	6
Tabel 3	Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM.....	11
Tabel 4	Target Tahun 2017.....	12
Tabel 5	Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2017.....	13
Tabel 6	Revisi Anggaran Pusat Penyuluhan 2017.....	14
Tabel 7	Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017.....	16
Tabel 8	Pelaksanaan Fisik Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2017.....	17
Tabel 9	Sebaran jumlah peningkatan kelas KTH dari kelas pemula ke madya per provinsi.	20
Tabel 10	Sebaran Jumlah PKSM dan PKS per provinsi .....	22
Tabel 11	Susunan Keanggotaan KPKN Tahun 2017.....	24
Tabel 12	Evaluasi Pelaksanaan Sekretariat Bakornas P3K .....	26
Tabel 13	KTH Penerima Fasilitas Posluhutdes Tahun 2017 .....	28
Tabel 14	Nama dan lokasi KTH penerima Kegiatan Fasilitas Unit Percontohan di KTH.....	29
Tabel 15	Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2017.....	32
Tabel 16	Penerima Penghargaan Pemenang Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2017.....	33
Tabel 17	Judul-judul artikel yang dimuat di Majalah “Kenari” Edisi Tahun 2017.....	40
Tabel 18	Jadwal kegiatan Pembinaan Pegawai Pusat Penyuluhan.....	53
Tabel 19	Rincian Pembentukan Koperasi KTH Tahun 2017.....	54
Tabel 20	Daftar LP2UKS Tahun 2017.....	57
Tabel 21	Rincian pembinaan tenaga pendamping KTH.....	60
Tabel 22	Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Ahli 2017.....	61
Tabel 23	Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Ahli 2017.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (PermenLHK No. 18/MENLHK-II/2015)...	5
Gambar 2	Foto Sekretariat KTH Taro Ada Kabupaten Bone Sulawesi Selatan .....	21
Gambar 3	Foto Pembuatan Gula Semut Aren di KTH Lajangnge Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan .....	21
Gambar 4	Foto Kartu Anggota PKSM .....	22
Gambar 5	Foto Pemaparan Rencana Kerja oleh Ketua KTH dalam Pembinaan Penyuluh Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan .....	22
Gambar 6	Foto Rapat KPKN Triwulan I .....	24
Gambar 7	Foto Rapat KPKN Triwulan II .....	24
Gambar 8	Foto Rapat KPKN Triwulan III .....	25
Gambar 9	Foto Keanggotaan KPKN .....	25
Gambar 10	Foto Rakortas Bakornas P3K tingkat Eselon I tanggal 6 Maret 2017.....	27
Gambar 11	Foto Rapat internal Bakornas P3K tingkat Eselon II tanggal 12 Desember 2017...	27
Gambar 12	Foto Poslulutdes KTH Rimba Raya Desa Tarung Manuah Kab. Kapuas.....	28
Gambar 13	Foto Poslulutdes KTH Panenga Desa Jabiren Kab. Pulang Pisau.....	28
Gambar 14	Foto Unit Percontohan di KTH Lalam Bersama Provinsi Kalimantan Tengah.....	30
Gambar 15	Foto Pembibitan Sengon Unit Percontohan di KTH Tunas Harapan Provinsi Kalimantan Selatan .....	30
Gambar 16	Foto Kegiatan verifikasi lapangan kategori KTH Ngudi Rejeki di Gunung Kidul DIY.....	31
Gambar 17	Foto Kegiatan verifikasi lapangan kategori Penyuluh Kehutanan PNS di Ponorogo Jawa Timur .....	31
Gambar 18	Foto Kegiatan verifikasi lapangan kategori PKSM di di Kab. Tapin, Kalimantan Selatan .....	31
Gambar 19	Foto Pembukaan Temu Karya .....	35
Gambar 20	Foto Sidang Bersama DPR MPR RI.....	35
Gambar 21	Foto Acara Ramah Tamah dengan Presiden RI di Istana Negara .....	35
Gambar 22	Foto Rekreasi di Gelanggang Samudera, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.....	33
Gambar 23	Foto Materi Penyuluhan Kehutanan .....	38
Gambar 24	Foto Majalah Kenari .....	40
Gambar 25	Foto Publikasi Media Cetak .....	42
Gambar 26	Bentuk Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan .....	43
Gambar 27	Atribut Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan .....	44
Gambar 28	Dokumen Renja Pusat Penyuluhan 2018.....	45
Gambar 29	Dokumen Program Penyuluhan 2018.....	47
Gambar 30	Foto Kegiatan Penanaman di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas .....	51
Gambar 31	Foto Wisata Small World Purwokerto .....	51
Gambar 32	Foto Pemberian Motivasi .....	51
Gambar 33	Foto Kegiatan Outbond Palawi .....	51

Gambar 34	Foto Hutan Rakyat di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur .....	55
Gambar 35	Foto Produk Propolis dari KTH HIPEC Kabupaten Pandeglang Banten.....	55
Gambar 36	Foto LP2UKS LMDH Madu Sari Kabupaten Purbalingga .....	56
Gambar 37	Foto Sarang lebah di LMDH Madu Sari Kabupaten Purbalingga .....	56
Gambar 38	Foto Pembinaan Penyuluh di Muara Gembong .....	59
Gambar 39	Foto Pembinaan Penyuluh di Kabupaten Probolinggo.....	59
Gambar 40	Foto Sesi Penyampaian Materi .....	62
Gambar41	Foto Praktek Penyusunan Desain Layout .....	62

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mendukungnya, yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan YME. Sebagai upaya pengembangan kualitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar maju dan mandiri serta mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, maka peran penyuluhan menjadi sangat strategis yang menjadi bagian integral tidak terpisahkan dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan PermenLHK No.39/MenLHK-II/2015 dan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk setiap tahunnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2019.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Tiga Pilar Pembangunan Nasional, pengelolaan SDA lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu tumpuan pembangunan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta paralel meningkatkan kemampuan SDA untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Penyuluhan kehutanan diposisikan paling depan dalam setiap aktivitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan karena merupakan bagian integral pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga harus terstruktur, direncanakan, dilembagakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terus menerus dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut Pusluh menyusun Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2017 sesuai dengan peraturan yang ada.

Laporan Tahunan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2017 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan dan hasil yang telah dicapai oleh Pusat Penyuluhan dalam periode satu tahun. Maksud disusunnya Laporan Tahunan 2017 adalah sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan selama tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menyajikan data dan informasi yang merupakan evaluasi pencapaian hasil kegiatan penyuluhan kehutanan baik fisik maupun keuangan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di masa mendatang.

Laporan Tahunan ini berisikan uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta inovasi sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan satker.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan tahunan Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
8. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

## **BAB II. ORGANISASI**

### **A. Tugas dan Fungsi**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan sebagai Eselon II yang berkedudukan dibawah Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Tugas Pusat Penyuluhan** : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

**Fungsi Pusat Penyuluhan** :

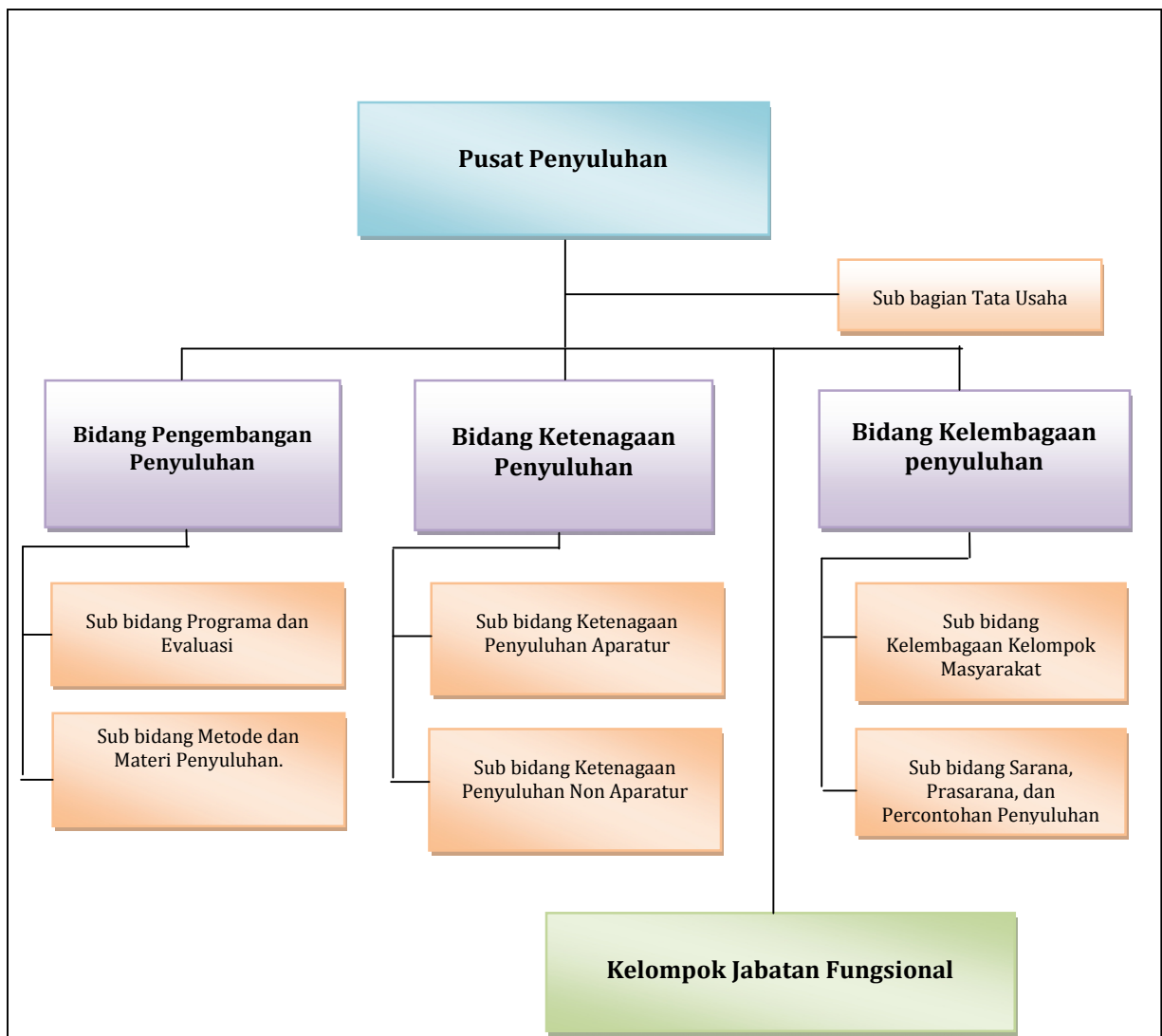
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

### **B. Organisasi**

Struktur Organisasi Pusluh sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MENLHK-II/2015 terdiri dari 3 Eselon III dan 7 Eselon IV, yaitu :

1. Bidang Pengembangan Penyuluhan.
2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan.

3. Bidang Kelembagaan penyuluhan.
4. Sub bagian Tata Usaha.
5. Sub bidang Program dan Evaluasi.
6. Sub bidang Metode dan Materi Penyuluhan.
7. Sub bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur.
8. Sub bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.
9. Sub bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat.
10. Sub bidang Sarana, Prasarana, dan Percontohan Penyuluhan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (PermenLHK No. 18/MENLHK-II/2015)

### C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Pusat Penyuluhan per 31 Desember 2017 berjumlah 54 orang terdiri dari 46 orang PNS dan 8 orang tenaga kontrak sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Pusat Penyuluhan

NO.	Jenjang Pendidikan	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JML
1.	Doktor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Pascasarjana	10	2	4	1	-	-	-	-	14	3	17
3.	Sarjana	-	3	8	11	-	-	-	-	8	14	22
4.	Sarjana Muda	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
5.	SLTA	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Jumlah (L+P)		10	6	15	12	3	0	0	0	28	17	46
Jumlah per Gol.		16		27		3		0		46		46

Keterangan : Tenaga Honorer : 8 orang

### D. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan tersedia prasarana berupa gedung perkantoran dan didukung sarana perkantoran: meja, kursi, lemari buku, *filling cabinet*, komputer, scanner, papan data, mesin ketik manual dan elektronik, pesawat telepon, *faximile*, *extension*, *white board*, tustel, *projector film*, *handycam*, *video player*, OHP, *wireless*, *megaphone*, alat pemotong kertas dan penghancur kertas elektrik. Disamping itu untuk kelancaran mobilitas digunakan sarana berupa kendaraan operasional roda dua dan kendaraan roda empat secara rinci tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pusat Penyuluhan

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
<b>PUSAT PENYULUHAN</b>				
1	Jeep	1	-	1

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	10	-	10
3	Sepeda Motor	1.816	-	1.816
4	Lori Dorong	1	-	1
5	Lemari Penyimpan	1	-	1
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	-	2
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	-	2
8	Lemari Besi/Metal	12	-	12
9	Lemari Kayu	5	-	5
10	Rak Kayu	9	-	9
11	Filing Cabinet Besi	5	-	5
12	Brandkas	5	-	5
13	Kardex Besi	15	-	15
14	Buffet	1	-	1
15	Papan Visual/Papan Nama	1	-	1
16	White Board	4	-	4
17	Copy Board/Elektrik White Board	1	-	1
18	Peta	2	-	2
19	Alat Penghancur Kertas	1	-	1
20	Globe	1	-	1
21	Mesin Absensi	2	-	2
22	Alat Pemotong Kertas	1	-	1
23	Headmachine Besar	1	-	1
24	Overhead Projector	2	-	2
25	Panel Pameran	1	-	1
26	Laser Pointer	3	-	3
27	LCD Projector/Infocus	2	-	2
28	Meja Kerja Kayu	40	-	40
29	Kursi Besi/Metal	79	-	79
30	Sice	6	-	6
31	Meja Rapat	14	-	14

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
32	Meja Komputer	14	-	14
33	Kursi Fiber Glas/Plastik	4	-	4
34	Lemari Es	2	-	2
35	Televisi	1	-	1
36	Wireless	3	-	3
37	Camera Video	1	-	1
38	Tustel	11	-	11
39	Dispenser	1	-	1
40	Handy Cam	6	-	6
41	Gordyin/Kray	1	-	1
42	DVD Player	2	-	2
43	Disc Record Player	1	-	1
44	Blitzzer	4	-	4
45	Camera Electronic	1	-	1
46	Video Caption Adder	1	-	1
47	Slide Projector	1	-	1
48	Lensa Kamera	2	-	2
49	Camera Digital	5	-	5
50	Duplicator DVD	1	-	1
51	GPS Receiver	5	-	5
52	Telephone (PABX)	1	-	1
53	Intermediate Telephone/Key Telephone	5	-	5
54	Facsimile	1	-	1
55	Message Switching Center (MSC)	1	-	1
56	Refrigerator	1	-	1
57	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	2	-	2
58	Komputer Jaringan Lainnya	1	-	1
59	P.C Unit	49	-	49
60	Lap Top	15	-	15
61	Note Book	18	-	18

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
62	Personal Komputer Lainnya	7	-	7
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	-	23
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	-	7
65	CD Writer	1	-	1
66	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	-	1
67	Software Komputer	57	-	57
68	AC Window	3	-	3
<b>TOTAL</b>		<b>2.306</b>	<b>-</b>	<b>2.306</b>

## BAB III. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Pusat Penyuluhan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015 s/d 2019, yaitu mewujudkan “Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan”.

**Tujuan** pembangunan KLHK mempunyai peran utama : 1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta menjaga kepunahan jenis, menjaga hutan; 3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

**Sasaran strategis** pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 s/d 2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,



dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Sasaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 yaitu: (1) Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara, (2) Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Renstra BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel 3.

Tabel 1. Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2015-2019
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.</b></li> <li>Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.</li> <li>Jumlah SDM Aparatur LHK/SMK Kehutanan yang meningkat kapasitasnya, 37.640 orang.</li> </ul>

Dalam RPJMN Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019, indikator kegiatan penyuluhan dalam mendukung Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Tahun 2015 – 2019 adalah : **“Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebanyak 5.500 unit KTH”**, dengan empat sasaran indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 5000 unit;
2. Terbentuknya koperasi kelas kelompok tani hutan sejumlah 500 unit;
3. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 250 unit;
4. Meningkatnya kapasitas jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.

Target KTH 2015-2017 adalah sebesar 1.422 unit KTH, dengan rincian 522 unit KTH pada tahun 2015, 450 unit tahun 2016 dan 450 unit tahun 2017. Target terbentuknya koperasi KTH 2015-2017 sejumlah 57 unit koperasi dengan rincian 25 unit koperasi tahun 2015, 22 unit koperasi tahun 2016 dan 10 unit koperasi tahun 2017. Target terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) 2015-2017 sejumlah 58 unit dengan rincian 33 unit LP2UKS tahun 2015, 15 unit LP2UKS tahun 2016, 10 unit LP2UKS tahun 2017. Sedangkan target tenaga pendamping handal 2015-2017 sejumlah 1.350 orang dengan rincian tahun 2015 sejumlah 600 orang, 2016 sejumlah 450 orang dan 2017 sejumlah 300 orang.

## B. Rencana Kerja Tahun 2017

Penjabaran dari Renstra 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2017 sebagaimana Rencana Kerja pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Tahun 2017

No.	Renja	Target Tahun 2017	
1.	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkat pemula ke madya, 5000 unit.	450	Unit
2.	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk sebanyak 500 unit.	10	Unit
3.	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebanyak 250 unit.	10	Unit
4.	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.	300	Orang

Sesuai Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor P.1/LUH/PP/PSDM.0/10/2016 tentang Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2017, menjabarkan tentang Rencana Kerja ke dalam rencana kegiatan yang dirinci dalam elemen kegiatan. Elemen kegiatan Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Kode	Uraian	Satuan	Volume
5444	Peningkatan Penyuluhan		
5444.001	Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 450 unit.	KTH	450
051	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH		
A	Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH	Laporan	1
B	Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH	Unit	80
C	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur	Laporan	1
D	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)	Laporan	1
E	Kesekretariat Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)	Laporan	1
F	Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)	Unit	4
G	Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan	Unit	6
052	Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan		
A	Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017	Laporan	1
B	Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017	Laporan	1
C	Pengadaan Materi Penyuluhan	Laporan	1
D	Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari	Edisi	1
E	Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik	Paket	1
F	Pengadaan Baju Penyuluh LHK	Stel	180
053	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan		
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018	Dokumen	1
B	Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018	Dokumen	1
C	Penyusunan Program Penyuluhan Tahun 2018	Dokumen	1
D	Updating data penyuluhan	Laporan	1
E	Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)	Laporan	19
F	Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016	Laporan	1
G	Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi	Laporan	1
H	Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan	Laporan	1
5444.002	Terbentuknya koperasi Kelompok Tani Hutan sejumlah 10 unit.	Unit	10
051	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi KTH		
A	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi	Unit	10
5444.003	Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 10 unit.	Unit	10

051	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)		
A	Verifikasi pembentukan LP2UKS	Laporan	1
B	Fasilitasi pembentukan LP2UKS	Unit	10
5444.004	Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang.	Orang	300
051	Pembinaan Teknis Penyuluh		
A	Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh	Laporan	1
B	Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluh Kehutanan Lingkup Pusluh	Laporan	1
5444.994	Layanan Perkantoran selama 12 Bulan.		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
A	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	Bulan	12
B	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat	Bulan	12
C	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua	Bulan	12
D	Operasional Perkantoran	Bulan	12

### C. Rencana Kinerja/RKAKL

Pagu anggaran kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2017 berjumlah Rp.8.450.000.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Satuan Kerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor : SP DIPA-029.08.1.400206/2017 tanggal 7 Desember 2016, yang terdiri dari sumber dana RM berjumlah Rp 5.022.000.000,- dan PNPB sebesar Rp 3.428.000.000,-. Pagu anggaran Pusat Penyuluhan sesuai dengan revisi sebesar Rp. 8.350.000.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Satuan Kerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor : SP DIPA-029.08.1.400206/2016 tanggal 4 Desember 2017.

Anggaran Pusat Penyuluhan tahun 2017 direvisi sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana tabel 6 berikut.

Tabel 6. Revisi Anggaran Pusat Penyuluhan 2017

Revisi ke-	Tanggal	Pagu (Rp)	Keterangan
1	16 Februari 2017	8.450.000.000,-	Revisi pertama terjadi karena perubahan pejabat penandatanganan SPM (PPSPM) dan pergeseran antar komponen dalam satu kegiatan.
2	18 April 2017	8.450.000.000,-	Revisi kedua terjadi karena perubahan kode akun untuk kegiatan fasilitasi kepada masyarakat yang semula menggunakan akun 521xxx menjadi akun

			526xxx dan pergeseran antar output dalam satu kegiatan
3	14 Juli 2017	8.450.000.000,-	Revisi ketiga terjadi karena perubahan perincian anggaran untuk menyesuaikan rencana penarikan anggaran dengan realisasi anggaran sesuai dengan evaluasi KPPN (termasuk dalam revisi POK)
4	28 Juli 2017	8.450.000.000,-	Revisi keempat terjadi karena kebijakan APBN-P, sehingga pagu Pusat Penyuluhan tidak dapat dicairkan ( <i>self-blocking</i> ) sebesar Rp. 100.000.000,-
5	9 Agustus 2017	8.350.000.000,-	Revisi Kelima terjadi karena pengesahan Pagu APBN-P Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 8.350.000.000,-
6	31 Oktober 2017	8.350.000.000,-	Revisi Keenam terjadi karena pergeseran antar komponen dalam satu kegiatan sesuai dengan kebijakan
7	4 Desember 2017	8.350.000.000,-	Revisi Ketujuh terjadi karena komponen dalam satu kegiatan dan menyesuaikan rencana penarikan anggaran dengan realisasi anggaran sesuai dengan evaluasi KPPN

## BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2017

### A. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran masing-masing kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2017 dan realisasinya sebagaimana dijelaskan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017

KODE	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi s/d bulan Desember	
			Keuangan	%
<b>029.08.10</b>	<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>			
<b>5444</b>	<b>Peningkatan Penyuluhan</b>	<b>8.350.000.000</b>	<b>8.331.923.673</b>	<b>99,78</b>
<b>5444.001</b>	<b>Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya</b>	<b>4.933.802.000</b>	<b>4.922.358.484</b>	<b>99,77</b>
<b>051</b>	<b>Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH</b>	<b>2.830.257.000</b>	<b>2.823.621.120</b>	<b>99,77</b>
A	Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH	204.190.000	203.664.574	99,74
B	Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH	1.930.340.000	1.925.622.644	99,76
C	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur	154.725.000	154.694.902	99,98
D	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)	110.500.000	110.317.500	99,83
E	Kesekretariat Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)	37.450.000	37.100.800	99,07
F	Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)	149.550.000	149.308.000	99,84
G	Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan	243.502.000	242.912.700	99,76
<b>052</b>	<b>Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan</b>	<b>1.345.429.000</b>	<b>1.341.613.473</b>	<b>99,72</b>
A	Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017	476.489.000	476.432.953	99,99
B	Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017	284.156.000	284.099.870	99,98
C	Penggandaan Materi Penyuluhan	234.574.000	234.416.000	99,93
D	Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari	47.670.000	47.655.750	99,97
E	Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik	212.540.000	209.368.900	98,51
G	Pengadaan Baju Penyuluh LHK	90.000.000	89.640.000	99,60
<b>053</b>	<b>Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan</b>	<b>758.116.000</b>	<b>757.123.891</b>	<b>99,87</b>
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018	77.325.000	77.189.300	99,82
B	Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018	66.951.000	66.841.200	99,84
C	Penyusunan Programa Penyuluhan 2018	20.365.000	20.365.000	100,00
D	Updating data penyuluhan	22.450.000	22.365.500	99,62
E	Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)	58.110.000	58.101.000	99,98
F	Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016	41.460.000	41.326.000	99,68

G	Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi	170.855.000	170.823.000	99,98
H	Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan	300.600.000	300.112.891	99,84
<b>5444.002</b>	<b>Terbentuknya koperasi Kelompok Tani Hutan</b>	<b>462.090.000</b>	<b>461.820.625</b>	<b>99,94</b>
<b>051</b>	<b>Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi KTH</b>	<b>462.090.000</b>	<b>461.820.625</b>	<b>99,94</b>
A	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi	462.090.000	461.820.625	99,94
<b>5444.003</b>	<b>Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)</b>	<b>427.458.000</b>	<b>425.987.200</b>	<b>99,66</b>
<b>051</b>	<b>Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)</b>	<b>427.458.000</b>	<b>425.987.200</b>	<b>99,66</b>
A	Verifikasi pembentukan LP2UKS	164.320.000	163.753.200	99,66
B	Fasilitasi pembentukan LP2UKS	263.138.000	262.234.000	99,66
<b>5444.004</b>	<b>Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH</b>	<b>1.326.650.000</b>	<b>1.326.112.959</b>	<b>99,96</b>
<b>051</b>	<b>Pembinaan Teknis Penyuluh</b>	<b>1.326.650.000</b>	<b>1.326.112.959</b>	<b>99,96</b>
A	Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh	1.277.400.000	1.276.862.959	99,96
B	Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluh Kehutanan Lingkup Pusluh	49.250.000	49.250.000	100,00
<b>5444,994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.195.644.405</b>	<b>99,64</b>
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.195.644.405</b>	<b>99,64</b>
A	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	31.500.000	31.500.000	100,00
B	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat	313.076.000	313.068.976	100,00
C	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua	45.500.000	45.499.929	100,00
D	Operasional Perkantoran	809.924.000	805.575.500	99,46

## B. Pelaksanaan Fisik Kegiatan

Pelaksanaan fisik masing-masing kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2017 dan realisasinya sebagaimana dijelaskan pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Pelaksanaan Fisik Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2017.

KODE	Uraian Kegiatan	Satuan	Target 1 Tahun	Realisasi s/d bulan Desember	
			Volume	Volume	%
<b>029.08.10</b>	<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>				
<b>5444</b>	<b>Peningkatan Penyuluhan</b>				<b>100,00</b>
<b>5444.001</b>	<b>Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya</b>	<b>Unit</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00</b>
<b>051</b>	<b>Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH</b>				<b>100,00</b>
A	Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH	Laporan	1	1	100,00
B	Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH	Laporan	1	1	100,00
C	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur	Laporan	1	1	100,00
D	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)	Laporan	1	1	100,00
E	Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)	Laporan	1	1	100,00
F	Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)	Laporan	1	1	100,00
G	Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan	Laporan	1	1	100,00
<b>052</b>	<b>Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan</b>				<b>100,00</b>

A	Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017	Laporan	1	1	100,00
B	Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017	Laporan	1	1	100,00
C	Penggandaan Materi Penyuluhan	Judul	2	2	100,00
D	Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari	Edisi	1	1	100,00
E	Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik	Dokumen	1	1	100,00
G	Pengadaan Baju Penyuluh LHK	Stel	180	180	100,00
<b>053</b>	<b>Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan</b>				<b>100,00</b>
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018	Dokumen	1	1	100,00
B	Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018	Dokumen	1	1	100,00
C	Penyusunan Program Penyuluhan 2018	Laporan	1	1	100,00
D	Updating data penyuluhan	Laporan	1	1	100,00
E	Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)	Laporan	18	18	100,00
F	Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016	Laporan	1	1	100,00
G	Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi	Laporan	1	1	100,00
H	Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan	Dokumen	1	1	100,00
<b>5444.002</b>	<b>Terbentuknya koperasi Kelompok Tani Hutan</b>	<b>Unit</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
<b>051</b>	<b>Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi KTH</b>				<b>100,00</b>
A	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi	Laporan	1	1	100,00
<b>5444.003</b>	<b>Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)</b>	<b>Unit</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
<b>051</b>	<b>Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)</b>				<b>100,00</b>
A	Verifikasi pembentukan LP2UKS	Dokumen	1	1	100,00
B	Fasilitasi pembentukan LP2UKS	Laporan	1	1	100,00
<b>5444.004</b>	<b>Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH</b>	<b>Orang</b>	<b>300</b>	<b>340</b>	<b>113,33</b>
<b>051</b>	<b>Pembinaan Teknis Penyuluh</b>				<b>100,00</b>
A	Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh	Laporan	10	10	100,00
B	Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluh Kehutanan Lingkup Pusluh	Laporan	1	1	100,00
<b>5444,994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>				<b>100,00</b>
A	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	Bulan	12	12	100,00
B	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat	Bulan	12	12	100,00
C	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua	Bulan	12	12	100,00
D	Operasional Perkantoran	Bulan	12	12	100,00

## Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan Dari Kelas Pemula Ke Madya

### 1. Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH

**Maksud** dari kegiatan perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah untuk mengetahui data/informasi tentang KTH antara lain jumlah KTH, kemampuan kelas KTH, lokasi KTH, jenis usaha KTH, ijin kegiatan



perhutanan sosial dan lain-lain di berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan **tujuannya** adalah menyediakan data/informasi KTH sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) di masa mendatang.

Perencanaan dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat pertemuan dan koordinasi dengan instansi lain, sedangkan identifikasi dilakukan dengan melakukan koordinasi atau kunjungan ke provinsi, kabupaten/kota atau Kelompok Tani Hutan (KTH) sesuai kondisi yang ada.

**Output** dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH adalah tersedianya data/informasi tentang KTH antara lain jumlah KTH, kemampuan kelas KTH, lokasi KTH, jenis usaha KTH, ijin kegiatan perhutanan sosial dan lain-lain di berbagai provinsi dan di Indonesia. Sedangkan **outcome**: terproyeksikannya KTH untuk kegiatan peningkatan kelas KTH.

Hasil identifikasi peningkatan kelas KTH merupakan croscek data antara KTH binaan Penyuluh Kehutanan dengan KTH pemegang ijin Perhutanan Sosial (PS) di beberapa provinsi antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Gorontalo, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Sulawesi Tenggara.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 204.190.000,- terealisasi keuangan Rp 203.664.574,- atau 99,74 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 2. Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH

Kegiatan fasilitasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) **dimaksudkan** untuk memberikan stimulan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha sehingga dapat meningkatkan kelas kelompok dari Pemula menjadi Madya. Sedangkan **tujuannya** adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) secara efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna.

Fasilitasi peningkatan kelas KTH dana Pusat Penyuluhan sebanyak 80 KTH dilakukan di 17 provinsi. Untuk mendukung capaian IKK 2017 sejumlah 450 KTH maka terdapat peningkatan kelas KTH melalui fasilitasi dana dekonsentrasi penyuluhan sebanyak 322 KTH dan dampak dari regulasi sebanyak 48 KTH di 33 provinsi.

Tabel 9. Sebaran jumlah peningkatan kelas KTH dari kelas pemula ke madya per provinsi

No		Kenaikan Kelas KTH		
		Dana Dekon	Dana Pusat	Regulasi
1	Banten	7	5	-
2	Jawa Barat	28	7	-
3	Jawa Tengah	30	-	-
4	Jawa Timur	30	8	-
5	DI Yogyakarta	15	5	48
6	Aceh	5	3	-
7	Sumatera Utara	7	-	-
8	Sumatera Barat	10	5	-
9	Riau	5	-	-
10	Kep. Riau	0	-	-
11	Jambi	7	-	-
12	Bangka Belitung	4	2	-
13	Sumatera Selatan	8	-	-
14	Bengkulu	6	5	-
15	Lampung	31	4	-
16	Kalimantan Barat	10	-	-
17	Kalimantan Tengah	6	11	-
18	Kalimantan Selatan	10	3	-
19	Kalimantan Utara	0	-	-
20	Kalimantan Timur	0	-	-
21	Sulawesi Utara	12	3	-
22	Sulawesi Tengah	9	2	-
23	Sulawesi Selatan	11	5	-
24	Sulawesi Tenggara	12	3	-
25	Gorontalo	10	-	-
26	Sulawesi Barat	5	-	-
27	Maluku	4	-	-
28	Maluku Utara	4	-	-
29	Bali	9	4	-
30	NTB	14	5	-
31	NTT	9	-	-
32	Papua	2	-	-
33	Papua Barat	2	-	-
<b>Total</b>		<b>322</b>	<b>80</b>	<b>48</b>

**Output** kegiatan ini adalah Jumlah kelas KTH dari pemula ke madya 5000 unit (target 5 tahun). Sedangkan **outcome**: kemandirian KTH dalam pengelolaan usaha bidang kehutanan.



Gambar 2. Sekretariat KTH Taro Ada Kabupaten Bone Sulawesi Selatan



Gambar 3. Pembuatan Gula Semut Aren di KTH Lajangnge Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 1.930.340.000,- terealisasi keuangan Rp 1.925.622.644,- atau 99,76 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

### 3. Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur

Kegiatan identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluh non aparatur **dimaksudkan** untuk mendata dan memetakan sebaran, aktifitas dan kegiatan serta kemampuan dan keterampilan PKSM dan PKS. **Tujuannya** yaitu untuk mengetahui sebaran, aktifitas dan kegiatan serta kemampuan dan keterampilan PKSM; mengetahui sebaran, aktifitas dan kegiatan serta kemampuan dan keterampilan PKS; melakukan pemetaan PKSM dan PKS; monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi PKSM melalui Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes).

Jumlah PKSM yang teregistrasi s.d. akhir Desember 2017 sebanyak 4.263 orang dan 52% nya telah diterbitkan kartu tanda anggota PKSM. Kegiatan PKSM antara lain melakukan pendampingan KTH dan kelompok masyarakat lainnya, pendampingan kegiatan perhutanan sosial, perlindungan mata air, konservasi tanah dan air, perlindungan flora fauna, pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Hasil identifikasi terhadap Penyuluh Kehutanan Swasta menunjukkan bahwa tidak terdapat penambahan data Penyuluh Kehutanan Swasta selama 2017 sehingga

jumlah Penyuluh Kehutanan Swasta masih berjumlah 441 orang yang tersebar di 17 provinsi, dan 125 perusahaan/divisi regional.



Gambar 4. Kartu Anggota PKSM



Gambar 5. Pemaparan Rencana Kerja oleh Ketua KTH dalam Pembinaan Penyuluh Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk membina Penyuluh Kehutanan non aparatur maka dilaksanakan kegiatan pembinaan ketenagaan penyuluh kehutanan non aparatur di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebaran jumlah PKSM dan PKS secara rinci pada Tabel 10.

Tabel 10. Sebaran Jumlah PKSM dan PKS per provinsi

No	PROVINSI	Jumlah PKSM	Jumlah PKS	No	PROVINSI	Jumlah PKSM	Jumlah PKS
1	Aceh	103	1	18	NTT	6	-
2	Sumatera Utara	17	40	19	Kalimantan Barat	114	64
3	Sumatera Barat	52	-	20	Kalimantan Tengah	38	2
4	Riau	94	31	21	Kalimantan Selatan	159	60
5	Jambi	32	64	22	Kalimantan Timur	4	8
6	Sumatera Selatan	104	71	23	Kalimantan Utara	10	-
7	Bangka Belitung	9	-	24	Sulawesi Utara	53	-
8	Bengkulu	207	-	25	Sulawesi Barat	104	-
9	Lampung	273	3	26	Sulawesi Tengah	123	-
10	Banten	84	2	27	Sulawesi Tenggara	72	-
11	Jawa Barat	1179	18	28	Sulawesi Selatan	83	-
12	DKI Jakarta	2	-	29	Gorontalo	6	1
13	Jawa Tengah	590	16	30	Maluku	2	31
14	D.I. Yogyakarta	137	5	31	Maluku Utara	6	-
15	Jawa Timur	339	16	32	Papua	5	-
16	Bali	134	-	33	DKI Jakarta	-	8
17	NTB	122	-		<b>TOTAL</b>	<b>4.263</b>	<b>441</b>

**Output** kegiatan ini yaitu jumlah tenaga, sebaran, aktifitas dan kegiatan serta, kemampuan dan keterampilan masing – masing penyuluh kehutanan baik Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) maupun Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS). **Outcome** yaitu mampu meningkatkan peran aktifn PKSM maupun PKS dalam pembangunan kehutanan secara luas dan berkesinambungan yang sekaligus mengatasi permasalahan social yang dihadapinya secara mandiri.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 154.725.000,- terealisasi keuangan Rp 154.694.902,- atau 99,98 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

#### 4. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)

Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 10 mengisyaratkan bahwa untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Menteri Kehutanan dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional. Tugas Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional adalah memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kehutanan.

**Maksud** penyelenggaraan Sekretariat Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN) adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan penyuluhan kehutanan secara optimal kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan **tujuannya** adalah kegiatan Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional bisa didukung administrasi dan pendanaan secara optimal sehingga kinerja Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional bisa mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. **Output** : tugas-tugas Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN) dapat berjalan dengan lancar. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu Komisi penyuluhan kehutanan nasional dapat melaksanakan tugasnya dan dapat memberikan masukan kepada Menteri LHK tentang pokok-pokok penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK.225/MENLHK/P2SDM/SDM.0/5/2017, Tanggal 9 Mei 2017 tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN). Susunan keanggotaan KPKN pada tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Susunan Keanggotaan KPKN Tahun 2017.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ir. Helmi Basalamah, MM	Ketua	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
2	Dr. Ir. Eka Widodo Soegiri, MM	Ketua Pelaksana Harian	Direktur Penanganan Konflik Tenurial Hutan Adat
3	Murtado, S.Hut, MP	Sekretaris	Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO)
4	Dra. Siti Aini Hanum, MA	Anggota	Kepala Pusat Penyuluhan
5	Ir. Yaman Mulyana, MM	Anggota	Pengamat Penyuluhan
6	Dr. Ir. Kartika Dianningsih Antono, MM.	Anggota	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
7	Ir. Erna Rosdiana, M.Si	Anggota	Direktur Penyiapan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial
8	Dr. Ir. Lies Rahayu	anggota	Akademisi (UGM)
9	drh. Indra Exploitasia	anggota	Direktur Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan.
10	Drs. H. Maman Suparman	Anggota	Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA)
11	Ir. Sri Bebasari, M.Si	Anggota	Indonesia <i>Solid Waste Association</i> (InSWA) dan Yayasan Pusat Pengembangan Sampah Indonesia (Yayasan PERISAI).
12	Ir. Marthin F.Haullussy, MS.Eng.	Anggota	Yayasan Alam Raya dan Masyarakat Niaga (ARMAN) Ambon Maluku, dan Penerima Kalpataru Pembina Lingkungan.

Pada tahun 2017 pelaksanaan rapat yang telah dilakukan oleh KPKN sebanyak 3 kali rapat triwulan, yaitu : Rapat Triwulan I pada tanggal 12 Juni 2017, Rapat Triwulan II pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Rapat Triwulan III tanggal 20 November 2017. Hasil rapat yaitu membahas beberapa permasalahan terkait kelembagaan penyuluhan, sumberdaya manusia penyuluh kehutanan, pembiayaan penyuluhan kehutanan dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.



Gambar 6. Rapat KPKN Triwulan I



Gambar 7. Rapat KPKN Triwulan II



Gambar 8. Rapat KPKN Triwulan III



Gambar 9. Keanggotaan KPKN

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 110.500.000,- terealisasi keuangan Rp 110.317.500,- atau 99,83 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 5. Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 telah dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakornas P3K) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dengan anggota Kepala Badan Penyuluhan dan SDM masing-masing Kementerian terkait, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota tidak tetap yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Bakornas P3K mempunyai tugas:mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Bakornas P3K yang bertugas memberi dukungan administrasi kepada Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pada periode tahun 2016 – 2017 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi *ex officio* dari Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**Maksud** penyelenggaraan Fasilitas Sekretariat Bakornas P3K adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Bakornas P3K sehingga mampu

mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyuluhan. **Tujuan** adalah untuk mendukung administrasi dan pendanaan secara optimal sehingga kinerja Bakornas P3K dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan. **Output** : tugas-tugas Bakornas P3K dapat berjalan dengan lancar. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu tersinkronisasikan dan optimalnya kinerja penyuluhan pada tingkat pusat. Evaluasi pelaksanaan sekretariat Bakornas 2017 sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Evaluasi Pelaksanaan Sekretariat Bakornas P3K

No	Permasalahan Penyuluhan	Tindak Lanjut	Hasil
1	Kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat tapak	1. Rakortas tingkat Eselon I pada tanggal 6 Maret 2017 di pimpin oleh Kepala Badan P2SDM selaku ketua sekretariat Bakornas P3K Dengan Peserta Rapat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Pertanian;</li> <li>• Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>• Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>• Para Pejabat Eselon III dan IV lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian anggota Bakornas P3K</li> </ul> 2. Surat Kepala Sekretariat Bakornas P3K Kepada Ketua Bakornas P3K Nomor :	Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 520/9340/OTDA Perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan
2	Pendanaan kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Daerah yang masih minim	S.48/P2SDM/LUH/OTL.0/4/2017 Tanggal 6 April 2017 Perihal Hasil Rapat Bakornas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K)	Masih Menunggu telaah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	Pemenuhan tenaga penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Daerah yang masih kurang		

Pada tahun 2017 pelaksanaan rapat yang telah dilakukan oleh Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakornas P3K) meliputi Rapat internal tingkat Eselon II tanggal 12 Desember 2017 dan Rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Eselon I tanggal 6 Maret 2017.





Gambar 10. Rakortas Bakornas P3K tingkat Eselon I tanggal 6 Maret 2017



Gambar 11. Rapat internal Bakornas P3K tingkat Eselon II tanggal 12 Desember 2017

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 37.450.000,- terealisasi keuangan Rp 37.100.800,- atau 99,07 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 6. Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)

Agar masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan kehutanan secara swadaya, maka perlu dibentuk suatu organisasi di tingkat desa, sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes). Melalui Posluhutdes diharapkan terjadi proses pembelajaran, terjadi temu warga KTH untuk memecahkan permasalahan kelompok dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di desa.

Pembentukan dan pengembangan Posluhutdes **dimaksudkan** untuk meningkatkan peran kelembagaan masyarakat di pedesaan dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan Lingkungan Hidup. **Tujuan** pembentukan dan pengembangan Posluhutdes adalah :

1. Meningkatkan kegiatan pembelajaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bagi masyarakat di pedesaan;
2. Memperkuat jejaring kerja penyuluhan kehutanan di pedesaan;
3. Meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat di pedesaan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kegiatan Fasilitas Posluhutdes memberikan kesempatan kepada PKSM dan calon PKSM untuk berperan aktif dalam pembangunan kehutanan. PKSM berperan sebagai fasilitator, stimulator (perangsang) dan motivator (pendorong). KTH penerima fasilitas Posluhutdes Tahun 2017 sebagaimana Tabel 13 berikut.

Tabel 13. KTH Penerima Fasilitas Posluhutdes Tahun 2017

NO	KTH	KETUA KTH	ALAMAT KTH	PK PENDAMPING	KEGIATAN PS
1	KTH Rimba Raya	Armin	Desa Tarung Manuah Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah	Singah, S.Hut	HTR
2	KTH Panenga	Berson, S.Pd	Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	Hendrawan Suryawinata, S.Hut	HTR
3	KTH Batuah	Afendi S.E.S	Desa Tambak Kec. Banamatingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	Ahmad Rizali Imnor, S.Hut	HD
4	KTH Hutan Lestari	Katmar Diris, S.Hut	Desa Tumbang Miwan Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Rody, A.Md	HKm

**Output** kegiatan ini yaitu terbentuknya Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes). **Outcome** dari kegiatan ini yaitu kelembagaan masyarakat di pedesaan dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.



Gambar 12. Posluhutdes KTH Rimba Raya Desa Tarung Manuah Kab. Kapuas



Gambar 13. Posluhutdes KTH Panenga Desa Jabiren Kab. Pulang Pisau

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 149.550.000,- terealisasi keuangan Rp 149.308.000,- atau 99,84 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 7. Fasilitasi Unit Percontohan

Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Salah satu sarana penyuluhan adalah unit percontohan. Unit Percontohan adalah lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktifitas kehutanan yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas penyuluhan penyuluhan kehutanan.

Berikut adalah lokasi dan nama KTH yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Fasilitasi Unit Percontohan di KTH Tahun 2017 sebagaimana Tabel 14.

Tabel 14. Nama dan lokasi KTH penerima Kegiatan Fasilitasi Unit Percontohan di KTH

No	Nama KTH	Alamat	Ketua Kelompok	Penyuluh Pendamping	Komoditas
1	Jaya Lestari	Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Alfrido Berdianto	Singah, S.Hut	Sengon
2	Lalam Bersama	Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Yulius Kadi	Antony, S.Hut	Sengon
3	Lewa	Desa Ponto, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	Alfonsius Sasuwang	Dezy Sarah Rande, S.Hut	Hutan Rakyat (Jabon Merah)
4	Pandawa Lestari	Desa Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung	Suryadi	Ahmad, SP, MMP	Hutan rakyat Pola Agroforestry dengan tanaman unggulan Damar mata kucing ( <i>Shorea javanica L</i> )
5	Sumber Lestari	Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur	Sungkono	Bambang Prayitno, S.Hut	Hutan Rakyat, porang, jahe
6	Tunas Harapan	Desa Hangui, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, KPH Hulu Sungai Provinsi Kalimantan Selatan	Supardi	Saidil Fathani, SP	Hutan Rakyat (Sengon)

Fasilitasi unit percontohan di KTH **dimaksudkan** untuk memberikan stimulan/dorongan bagi berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan kelompok tani hutan. Selanjutnya diharapkan akan terbangun lebih banyak unit percontohan – unit percontohan di Kelompok Tani Hutan. Sedangkan **tujuannya** adalah sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas penyuluhan penyuluhan kehutanan. **Output** dari kegiatan ini yaitu terbentuknya unit percontohan di KTH. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan serta peningkatan kapasitas penyuluhan penyuluhan kehutanan.



Gambar 14. Unit Percontohan di KTH Lalam Bersama Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 15. Pembibitan Sengon Unit Percontohan di KTH Tunas Harapan Provinsi Kalimantan Selatan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 243.502.000,- terealisasi keuangan Rp 242.912.700,- atau 99,76 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 8. Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017

Untuk meningkatkan motivasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparat Pemerintah yang telah berprestasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari. Lomba dan Apresiasi Wana Lestari dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional.

Pada tahun 2017, penghargaan lomba diberikan terhadap beberapa kategori seperti Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kader Konservasi Alam (KKA), dan Kelompok Pecinta

Alam. Penghargaan Lomba Wana Lestari juga mengapresiasi program perhutanan sosial yaitu pada kategori Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan dan Pengelola Hutan Desa. Selain ke tujuh kategori lomba tersebut, diberikan apresiasi terhadap kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Pengelola Hutan Adat.

Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari.



Gambar 16. Kegiatan verifikasi lapangan kategori KTH Ngudi Rejeki di Gunung Kidul DIY



Gambar 17. Kegiatan verifikasi lapangan kategori Penyuluh Kehutanan PNS di Ponorogo Jawa Timur



Gambar 18. Kegiatan verifikasi lapangan kategori PKSM di di Kab. Tapin, Kalimantan Selatan



Berdasarkan KepmenLHK Nomor: SK.380/MENLHK/P2SDM/PEG.7/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 ditetapkan Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2017 sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15. Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2017

**I. PENYULUH KEHUTANAN PNS**

No	Peringkat	Nama/NIP	Instansi
1.	Terbaik I	HERY PRAMUDYA WIJAYA, S.Hut / 19791008 201001 1 016	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II Ponorogo
2.	Terbaik II	PAHLIM, S.Hut / 19740313 200803 1 002	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan KPH Hulu Sungai
3.	Terbaik III	MENI HENDRAWATI, S.Hut / 19810308 201101 2 001	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Sub Das Belayan
4.	Harapan I	I WAYAN SUASTIKA, SP / 19601231 198903 190	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
5.	Harapan II	PROBO RAHARJO, S.Hut / 19750719 200003 1 005	Dinas Kehutanan Provinsi Bali UPT KPH Bali Selatan
6.	Harapan III	JOKO SINGKOWO, S.P./ 19751009 200604 1 002	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung UPTD. KPH Unit XII Gunung Balak Lampung

**II. KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)**

No	Peringkat	Nama Kelompok Tani/ Ketua	Alamat
1.	Terbaik I	KTH NGUDI REJEKI I/ Sutarman	Padukuhan Tompak, Desa Giritirto, Kec. Purwosari, Kab. Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
2.	Terbaik II	KTH MARGO MULYO/ Hariyanto	Desa Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3.	Terbaik III	KTH PANTAI LESTARI/ Ali Sodikin	Desa Karangsong, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat
4.	Harapan I	KTH DANA KALA/ Anwar	Desa Ntori, Kec. Wawo Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
5.	Harapan II	KTH KANAAN/ Isyayar Apata Sumba	Desa Mangkupum, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Harapan III	KTH PEDULI LINGKUNGAN/ Muh. Amir Esa	Desa Gunung Perak, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

**III. PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT**

No	Peringkat	Nama	Alamat
1.	Terbaik I	IBNU KASIR AL-AQILI	Desa Hatungun, Kec. Hatungun, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Terbaik II	I WAYAN SUDARMA	Desa Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasam, Provinsi Bali
3.	Terbaik III	NANANG ADI WIJAYA, SE	Desa Gedangan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
4.	Harapan I	MUH ANWAR	Desa Mekar Sari, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB
5.	Harapan II	ZULNASRI, S.Pd.I	Desa Koto Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau
6.	Harapan III	HERI SUSANTO	Desa Pagerharjo, Kec. Samigalur, Kab. Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta

**IV. KADER KONSERVASI ALAM**

No	Peringkat	Nama	Alamat
1.	Terbaik I	NOVITA ARDIYANSARI	Kelurahan Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
2.	Terbaik II	SUHARIYONO, SAP	Desa Oro Oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3.	Terbaik III	ISMAIL HAMID	Desa Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

## V. KELOMPOK PECINTA ALAM

No	Peringkat	Nama KPA/ Ketua	Alamat
1.	Terbaik I	KeSEMaT/ Febriyadi Fajar Sulistiyo	Jl. Ngesrep Barat V No. 35, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2.	Terbaik II	RESACITA (Remaja SMAN 1 Pamekasan Cinta Alam)/ Arini Wahyu Ningtyas	Jl. Pramuka No.2, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
3.	Terbaik III	MAPALASKA/ M. Arifudin Adli	UIN Sunan Kalijaga, Kelurahan Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta

## VI. KELOMPOK MASYARAKAT PEMEGANG IZIN HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm)

No	Peringkat	Nama Kelompok	Alamat
1.	Terbaik I	HKm SIDODADI	Desa Pekon Sinar Jaya, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung
2.	Terbaik II	HKm SIDOAKUR	Desa Argowilis, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
3.	Terbaik III	HKm JURU SEBRANG	Desa Juru Seberang, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung

## VII. KELOMPOK MASYARAKAT HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

No	Peringkat	Nama Kelompok	Alamat
1.	Terbaik I	LPHD DEPATI JUNJUNG	Desa Taba Padang, Kec. Seberang Musi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
2.	Terbaik II	LPHN SIRUKAM	Nagari Sirukam, Kec. Payung Sekaki, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan KepmenLHK Nomor: SK.381/MENLHK/P2SDM/PEG.7/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 ditetapkan Penerima Penghargaan Pemenang Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2017 sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Penerima Penghargaan Pemenang Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional 2017

### I. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

No	Nama/ NIP	Unit Kerja
1.	DARMAWAN SUSILO, S.Sos / 19751013 200003 1 001	Seksi Wilayah III BPPHLHK Wilayah Kalimantan
2.	SAMSUL HADI, SP., M.Sc / 19721105 199903 1 001	Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
3.	NENENG KURNIASIH, SE / 19790503 200811 2 001	Direktorat Penegakan Hukum Pidana

### II. MANGGALA AGNI

No	Nama	Daops
1.	SURIADI	Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
2.	TRI PRIYO SAPUTRO	Paser, Provinsi Kalimantan Timur
3.	BENNY TAKASAHENG	Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

### III. MASYARAKAT PEDULI API (MPA)

No	Nama	Alamat
1.	MUH. ZAINUDDIN	MPA Batara Malili, Provinsi Sulawesi Selatan
2.	M. YANI	MPA Bintang Api Pangkalanbun, Provinsi Kalimantan Tengah
3.	BAKRI DG. NAI	MPA Bunga Mawar Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

### IV. PENGELOLA HUTAN ADAT

No	Nama Hutan Adat	Alamat
1.	Tapang Semedak Tapang Kemayau	Kalimantan Barat

Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari **dimaksudkan** untuk mengetahui dan menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu. Adapun **tujuannya** yaitu memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang telah berperan aktif dan peduli dalam berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. **Output** kegiatan ini yaitu terselenggaranya Lomba dan Apresiasi Wana Lestari tahun 2017. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu merangsang dan memotivasi komponen masyarakat untuk secara aktif ikut terlibat dan berperan aktif dalam upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 476.489.000,- terealisasi keuangan Rp 476.432.953,- atau 99,99 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 9. Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017

Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari diselenggarakan sebagai media bagi para pemenang lomba untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan kehutanan. Ajang ini juga **dimaksudkan** sebagai sarana membangun jejaring kerja antar sesama peserta. Rangkaian kegiatan lomba dan Temu Karya ini merupakan salah satu metoda penyuluhan yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan motivasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. **Output** yang diharapkan adalah terselenggaranya pemberian penghargaan kepada pemenang lomba dan penerima apresiasi Wana Lestari Tahun 2017, serta terbentuknya jejaring kerja diantara para pemenang lomba dan penerima apresiasi. **Outcome** yang diharapkan adalah meningkatnya dampak yang diberikan oleh para pemenang lomba kepada masyarakat luas berupa peningkatan peran aktif mereka dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2017 diselenggarakan pada tanggal 15 s/d 19 Agustus 2017 di Hotel Santika Premiere – Jakarta Pusat. Tema Temu Karya Pemenang Lomba Apresiasi Wana Lestari Tahun 2017 adalah *“Kerja Bersama Kunci keberhasilan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”*.





Gambar 19. Pembukaan Temu Karya



Gambar 20. Sidang Bersama DPR MPR RI



Gambar 21. Acara Ramah Tamah dengan Presiden RI di Istana Negara



Gambar 22. Rekreasi di Gelanggang Samudera, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta

Peserta Temu Karya 2017 sejumlah 17 orang teladan yang terdiri dari Juara I Tingkat Nasional kategori lomba, 4 orang penerima apresiasi dan 6 orang penerima penghargaan Pengendali Ekosistem Hutan (pelaksanaan penilaian oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM), dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Kategori Lomba

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Penyuluh Kehutanan PNS                | : 1 orang |
| b. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat | : 1 orang |
| c. Kelompok Tani Hutan                   | : 1 orang |
| d. Kader Konservasi Alam (KKA)           | : 1 orang |
| e. Kelompok Pecinta Alam (KPA)           | : 1 orang |
| f. Kelompok Masyarakat Pemegang Izin HKm | : 1 orang |
| g. Pemegang Hutan Desa                   | : 1 orang |

#### 2. Kategori Apresiasi

Kegiatan Temu Karya menghadirkan 2 kategori apresiasi dari total 4 kategori apresiasi yang dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan 2 kategori apresiasi lainnya sudah memiliki ajang tersendiri untuk pemberian penghargaan kepada penerima

apresiasi. Kategori penerima apresiasi yang pemberian penghargaannya pada acara Temu Karya adalah:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 3 orang
- b. Pengelola Hutan Adat : 1 orang

3. Kategori Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

Sehubungan dengan permohonan dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM pada rapat Persiapan Temu karya Tahun 2017, pemberian penghargaan kepada 6 orang pemenang kategori PEH diikutsertakan pada acara Temu Karya dengan rincian sebagai berikut:

- a. PEH Ahli : 3 orang
- b. PEH Terampil : 3 orang

Sementara itu, pemberian penghargaan untuk kategori apresiasi Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api tidak diberikan pada acara Temu Karya, hal ini dikarenakan kedua kategori tersebut sudah memiliki ajang pemberian penghargaan tersendiri.

Kegiatan dalam Temu Karya :

1) Pembukaan Temu Karya

Pembukaan Temu Karya oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) pada tanggal 15 Agustus 2017. Pembukaan Temu Karya juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

2) Penjelasan Umum Temu Karya oleh Kepala Pusat Penyuluhan

Dalam rangka menyamakan persepsi tentang kegiatan Temu Karya Pemenang Lomba dan penerima apresiasi Wana Lestari, disampaikan penjelasan umum oleh Kepala Pusat penyuluhan

3) Menghadiri Sidang Bersama DPR MPR RI

Guna menambah wawasan dan pengalaman, para teladan pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari tahun 2017 yang selanjutnya disebut peserta Temu Karya berkesempatan untuk menghadiri Sidang Bersama DPR MPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017.

4) Pemberian Penghargaan dan Temu Wicara dengan Menteri LHK

Temu wicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017 setelah peserta menghadiri Sidang Bersama DPR MPR RI. Temu wicara ini merupakan media untuk berdialog langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga turut hadir dalam acara ini. Kemudian pemberian penghargaan diberikan kepada para peserta oleh kedua Menteri tersebut.

- 5) Mengikuti Rangkaian Acara Peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-71  
Guna meningkatkan rasa bangga atas prestasi yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peserta Temu Karya berkesempatan untuk mengikuti rangkaian Acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 yaitu:
- a. Tanggal 17 Agustus 2017 Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Pusaka di Istana Negara.
  - b. Tanggal 18 Agustus 2017 mengikuti Acara Ramah Tamah dengan Presiden RI di Istana Negara.
- 6) Rekreasi  
Sebagai wahana penambah wawasan peserta dan memupuk rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia. Peserta mengunjungi Ocean Dream Samudera (Gelanggang Samudera) pada tanggal 17 Agustus 2017 setelah mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara.
- 7) Penutupan Temu Karya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 284.156.000,- terealisasi keuangan Rp 284.099.870,- atau 99,98 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## **10. Penggandaan Materi Penyuluhan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan, materi penyuluhan kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan hidup.

Materi penyuluhan disajikan dalam berbagai bentuk yaitu media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, dll) dan media elektronik (video). Kegiatan penggandaan materi penyuluhan dalam bentuk media cetak buku sebagai berikut:

- a. Buku “Membangun Jejaring Kerja dan Kemitraan” sebanyak 1300 eks
- b. Buku “Modul Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan” sebanyak 1000 eks
- c. Buku “Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan” sebanyak 1065 eks
- d. Buku “Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial tahun 2017” sebanyak 400 eks



Gambar 23. Materi Penyuluhan Kehutanan

**Output** dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi terkini bagi penyuluh kehutanan maupun masyarakat seputar kegiatan penyuluhan kehutanan dan perhutanan sosial.
2. Meningkatnya jumlah materi penyuluhan kehutanan khususnya dalam bentuk media cetak.

**Outcome** yaitu meningkatnya pengetahuan dan wawasan penyuluh kehutanan dan masyarakat seputar kebijakan dan materi-materi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 234.574.000,- terealisasi keuangan Rp 234.416.000,- atau 99,93 % dengan target fisik 2 judul dengan capaian realisasi fisik 2 judul atau fisik 100%.

## **11. Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari**

Majalah penyuluhan kehutanan “Kenari” terbit dengan tema “Peran Serta Penyuluhan Kehutanan dalam Perhutanan Sosial”. Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian dengan membuka akses legal untuk masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 Ha.

Untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan majalah penyuluh kehutanan “Kenari” tahun 2017 telah ditetapkan dewan redaksi melalui surat keputusan Kepala Pusat Penyuluhan No. SK.7/LUH/PP/SDM.0/1/2017 tentang Dewan Redaksi Majalah Penyuluhan “Kenari” Tahun 2017 pada tanggal 19 Januari 2017. Susunan keanggotaan dewan redaksi sebagaimana berikut:

Penanggung Jawab	:	Dra. Siti Aini Hanum, MA
Ketua Redaktur	:	Ir. Pambudi Mahanto, MSi
Anggota	:	1. Denni Rasyid, SE, M.Si 2. Drs. Haniriyanto, M.Si 3. Dr. Ir. Yumi Angelia, M.Si 4. Indri Puji Rianti, S.Hut. M.Sc
Penyunting/Editor	:	1. Ir. Victor Winarto, ME 2. Firmansyah, S.Hut. M.Si 3. Ernita M. Thersia, S.Hut
Sekretariat	:	1. Sutarno 2. Yamin 3. Cucu Setiawati, S.Hut
Design Grafis	:	1. Jaya Suhendi 2. Rusli Akasyah, A.Md.

Tabel 17. Judul-judul artikel yang dimuat di Majalah “Kenari” Edisi Tahun 2017

No	Nama	Judul
1	Ir. Ryke Lilik S Siswari	Dari Sawan ke Thailand
2	Ir. Victor Winarto, SE	Hutan Kemasyarakatan Salah Satu Jurus Jitu Mengamankan Kawasan
3	Ir. Endang Dwi Hastuti, MM	Mengintip Peraturan tentang Perhutanan Sosial, dimana Peran Penyuluh Kehutanan?
4	Ir. Rita Marsi	Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang sebagai Contoh Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat
5	Indri Puji Rianti, S.Hut, M.Sc	Gerakan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan
6	Firmansyah, S.Hut, M.Si	Hutan Adat sebagai Benteng Kokoh untuk Pelestarian Hutan Indonesia Mengetahui Lebih Dekat Joko Surahmad PKSM dari Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau
7	Nden Rissa Hadikusumah, S.Hut	Geliat Koperasi KTH Wono Asri Lumajang Jawa Timur
8	Budi Budiman, S.Hut, M.Sc	Poslulutdes Jaya Teriti Wadah Tunai Bakti PKSM Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pendampingan Kegiatan Perhutanan Sosial
9	Rusmalia, S.Hut	Keberhasilan Kemitraan KTH Madu Kelungkung dengan Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) dalam Peningkatan Ekonomi Anggota Kelompok
10	Eli Sugianto, S.Hut	Menengok Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Limbah Gergajian Kayu Pembawa Berkah
11	Cucu Setiawati, S.Hut	Teladan Lomba Wana Lestari 2017
12	Sri Muherni	Pemanfaatan Lahan Bawah tegakan dengan Cabe Jamu
13	R.Didin Sudiardini	Membangun Komunikasi Efektif Antara Penyuluh Dan Kelompok Tani Hutan Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Penyuluhan



Gambar 24. Majalah Kenari

**Output** penerbitan “Kenari” adalah:

1. Tersedianya informasi terkini bagi penyuluh kehutanan maupun masyarakat seputar kegiatan perhutanan sosial dan kaitannya dengan penyuluhan kehutanan.
2. Meningkatnya jumlah materi/bacaan tentang kegiatan penyuluhan kehutanan.

**Outcome** yaitu meningkatnya pengetahuan dan wawasan penyuluh kehutanan dan masyarakat tentang kegiatan perhutanan sosial dan kaitannya dengan penyuluhan kehutanannya.

Majalah diterbitkan tidak dalam bentuk cetak tetapi dalam bentuk elektronik yaitu e-Magazine. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran DIPA Pusat

Penyuluhan tahun 2017. Majalah diupload pada Website Pusat Penyuluhan (alamat website: bp2sdm.menlhk.go.id/pusluh pada bulan Desember 2017. Penyebaran informasi terkait penerbitan majalah ke daerah dilakukan melalui surat Kepala Pusat Penyuluhan No. S.668/LUH/PP/DTN.2/12/2017 perihal Penerbitan Majalah Penyuluhan Kehutanan “Kenari” Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 47.670.000,- terealisasi keuangan Rp 47.655.750,- atau 99,97 % dengan target fisik 1 edisi dengan capaian realisasi fisik 1 edisi atau fisik 100%.

## 12. Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik

Materi penyuluhan kehutanan yang disampaikan kepada sasaran/masyarakat penyuluhan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya seiring dengan kebutuhan di lapangan dan dilakukan secara berkesinambungan. Pusat Penyuluhan mengembangkan publikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik sebagai sarana/media informasi kegiatan penyuluhan untuk masyarakat/sasaran penyuluhan.

Publikasi dalam bentuk media elektronik tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, sedangkan publikasi media cetak kegiatan penyuluhan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Majalah Ekonomi Hijau edisi Februari 2017 dengan judul “Dewi Sulistyowati, Penyuluh kehutanan. Berjuang Hidupkan Lahan Tidur di Desa Margodadi”.



2. Majalah Ekonomi Hijau edisi Juni 2017 dengan judul “Berjuang secara Swadaya untuk Masyarakat Pasaman”



Gambar 25. Publikasi Media Cetak

**Output** dari kegiatan publikasi media cetak dan elektronik adalah:

1. Meningkatnya jumlah publikasi kegiatan penyuluhan kehutanan khususnya dalam bentuk media cetak yaitu majalah.
2. Tersedianya informasi terkini bagi penyuluh kehutanan maupun masyarakat seputar kegiatan perhutanan sosial dan kaitannya dengan penyuluhan kehutanan.

Sedangkan **outcome** yaitu :

1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan penyuluh kehutanan dan masyarakat tentang kegiatan penyuluhan kehutanan.
2. Meningkatnya motivasi masyarakat/pelaku utama kegiatan penyuluhan dalam melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 212.540.000,- terealisasi keuangan Rp 209.368.900,- atau 98,51 % dengan target fisik 1 dokumen dengan capaian realisasi fisik 1 dokumen atau fisik 100%.

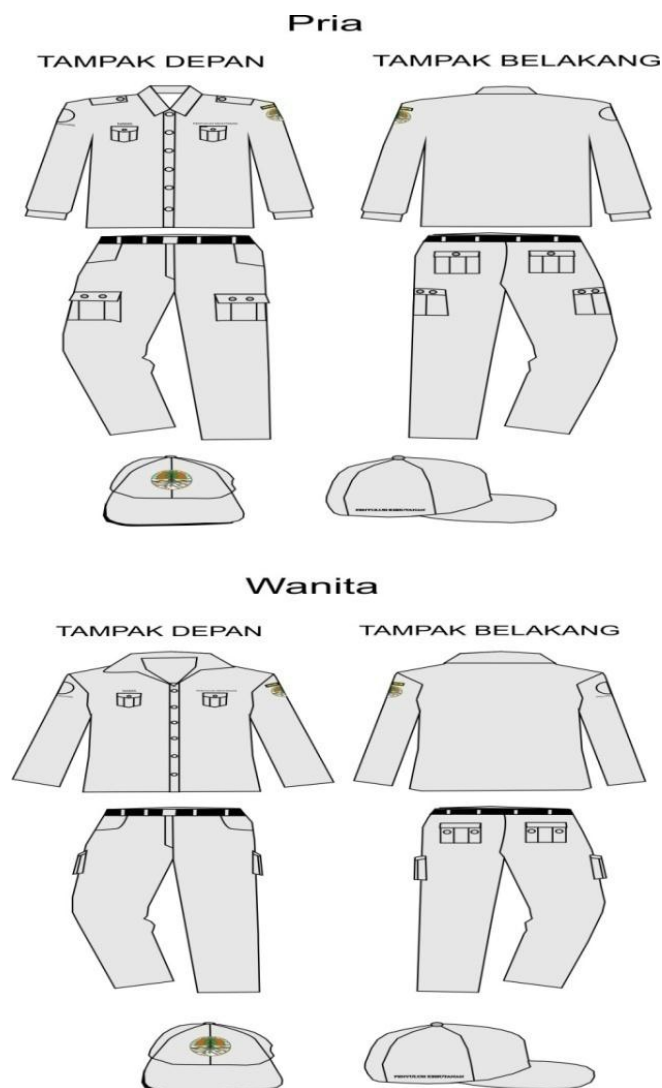
### 13. Pengadaan Baju Penyuluh LHK

Berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, pakaian dinas penyuluh kehutanan PNS adalah



pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus dikenakan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. Pakaian dinas Penyuluh Kehutanan PNS terdiri atas: seragam (kemeja lengan panjang, celana panjang, topi) dan atribut (lambang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lambang daerah provinsi, label Penyuluh Kehutanan, papan nama).

Bentuk Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan:



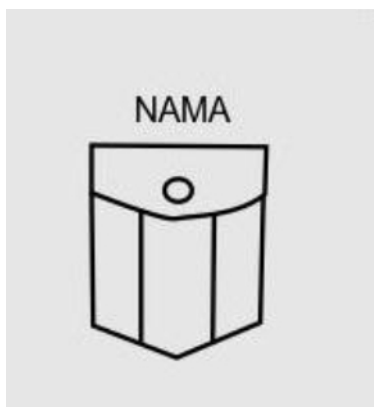
Gambar 26. Bentuk Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan



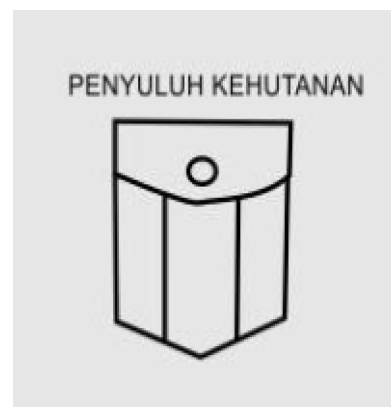
Logo kementerian posisi di lengan sebelah kiri.



Nama Eselon I atau Lambang daerah di lengan sebelah kanan



Papan nama posisi dada sebelah kanan di atas saku kanan



Tulisan PENYULUH KEHUTANAN posisi dada sebelah kiri di atas saku kiri

Gambar 27. Atribut Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan

Tahun 2017 Pusat Penyuluhan menyelenggarakan pengadaan baju penyuluh LHK sejumlah 180 stel. Guna memenuhi kebutuhan seragam penyuluh maka Kepala Pusat Penyuluhan mengirimkan surat ke daerah (34 provinsi) melalui surat no. 624/LUH/PP/KUM.1/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Penyampaian Salinan Peraturan MENLHK tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS, agar pengadaan pakaian Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS dapat dianggarkan pada APBD masing-masing Satker dengan berpedoman pada P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017. **Output** : tersedianya seragam penyuluh

kehutanan. Sedangkan **outcome** : meningkatnya peran aktif penyuluh kehutanan dalam mendukung kegiatan pembangunan kehutanan.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 90.000.000,- terealisasi keuangan Rp 89.640.000,- atau 99,60 % dengan target fisik 180 stel dengan capaian realisasi fisik 180 stel atau fisik 100%.

#### 14. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018

Dokumen Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2018 adalah instrumen dasar sebagai acuan kerangka kerja, perkiraan pembiayaan, dan capaian fisik pada kegiatan peningkatan penyuluhan. Rencana kerja memberikan informasi berupa program, kebijakan, kegiatan, sasaran, tujuan dan hasil serta keluaran yang diharapkan.



Gambar 28. Dokumen Renja Pusat Penyuluhan 2018

**Output** dari kegiatan Penyusunan Renja Tahun 2018 adalah tersusunnya dokumen perencanaan tahunan atau Renja mengacu pada Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015 - 2019.

**Outcome** dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan peningkatan penyuluhan kehutanan sehingga kualitas kegiatan penyuluhan kehutanan semakin baik.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 77.325.000,- terealisasi keuangan Rp 77.189.300,- atau 99,82 % dengan target fisik 1 dokumen dengan capaian realisasi fisik 1 dokumen atau fisik 100%.

## **15. Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018**

Kegiatan ini **dimaksudkan** untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dalam penyusunan anggaran yang dilakukan setiap tahun dan memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam RKA-K/L. **Output** dari kegiatan ini yaitu tersusunnya RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan peningkatan penyuluhan kehutanan sehingga kualitas kegiatan penyuluhan kehutanan semakin baik.

Pagu anggaran kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2018 berjumlah Rp.10.854.600.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Satuan Kerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor : SP DIPA-029.08.1.400206/2018 tanggal 5 Desember 2017, yang terdiri dari sumber dana RM berjumlah Rp 8.964.600.000,- dan PNBPN sebesar Rp 1.890.000.000,-.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 66.951.000,- terealisasi keuangan Rp 66.841.200,- atau 99,84 % dengan target fisik 1 dokumen dengan capaian realisasi fisik 1 dokumen atau fisik 100%.

## **16. Penyusunan Program Penyuluhan 2018**

Berdasarkan SK MENPAN Nomor 27 Tahun 2013, penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. Dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan agar tujuan penyuluhan dapat tercapai, serta sesuai dengan arah kebijakan prioritas pembangunan hutan, maka penyuluh kehutanan perlu membuat program penyuluhan kehutanan.

Program penyuluhan kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan, merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program Penyuluhan kehutanan bersinergi dengan perencanaan kegiatan Pusat Penyuluhan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan. Selain itu, program penyuluhan kehutanan disusun untuk mendukung pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK) Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.



Gambar 29. Dokumen Programa Penyuluhan 2018

**Output** dari kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan 2018.

**Outcome** yaitu terwujudnya sinergisitas baik di tingkat pusat, provinsi/kabupaten/kota dengan unsur terkait lain dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) bagi para Penyuluh Kehutanan di pusat Tahun 2018 dan sekaligus sebagai bahan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2018.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 20.365.000,- terealisasi keuangan Rp 20.365.000,- atau 100,00 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 17. Updating Data Penyuluhan

Terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah peta pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Termasuk yang ikut berubah adalah untuk urusan bidang kehutanan, di mana penyelenggaraan penyuluhan termasuk di dalamnya.

Mengantisipasi perpindahan penyuluh dari daerah ke provinsi, maka diperlukan updating data penyuluh kehutanan. Perubahan data yang terjadi di daerah baik mengenai jumlah dan sebaran Penyuluh Kehutanan harus tetap dipantau dan secara kontinu dilakukan updating. Data penyuluh kehutanan terutama Penyuluh Kehutanan Aparatur ini berkaitan erat dengan kegiatan pendampingan penyuluhan kehutanan di masing-masing daerah dan berpengaruh terhadap penentuan kegiatan pusat penyuluhan. Jumlah Penyuluh Kehutanan di seluruh Indonesia yang telah diperbaharui kemudian akan dipilah kedalam beberapa kriteria yaitu jenjang jabatan, jenjang pendidikan, jenjang kediklatan, kelas umur, dan jenis kelamin. Pembagian kategori jumlah Penyuluh Kehutanan tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk menentukan tunjangan fungsional, penyerahan sarana prasarana

sepeda motor, penerimaan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) dan untuk kepentingan lainnya.

Updating Data Penyuluh Kehutanan Aparatur dilaksanakan dengan **maksud** sebagai dasar penyusunan pangkalan data dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH). Adapun **tujuannya** yaitu untuk :

1. Mengetahui perkembangan terbaru data dan informasi Penyuluh Kehutanan.
2. Menyusun data dan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk soft file yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan statistik penyuluhan.
3. Mengembangkan sistem pangkalan data online terkait Penyuluh Kehutanan melalui peluncuran website SIMLUH.

Kegiatan updating Penyuluh Kehutanan ini dilakukan di 34 provinsi baik melalui mekanisme persuratan maupun melalui uji petik/pendataan Pembinaan Penyuluh Kehutanan per Provinsi. Lokasi yang dilakukan pendataan melalui Pembinaan Penyuluh Kehutanan antara lain yaitu : Provinsi Kalimantan Tengah, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah.

Data dan informasi yang dihimpun berupa rekapitulasi informasi singkat identitas personil masing-masing Penyuluh Kehutanan yang memuat informasi lengkap personil Penyuluh Kehutanan. **Output** dari kegiatan ini yaitu tersedianya dan ter-update data Penyuluh Kehutanan berdasarkan jumlah dan sebarannya di setiap provinsi/kabupaten/kota, serta tersusunnya database SIMLUH-HUT. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu data penyuluh kehutanan berkaitan erat dengan kegiatan pendampingan penyuluhan kehutanan di masing-masing daerah dan berpengaruh terhadap penentuan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 22.450.000,- terealisasi keuangan Rp 22.365.500,- atau 99,62 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## **18. Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)**

Laporan Satker dibuat dalam bentuk bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dan pada akhir tahu anggaran disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan bulanan sejumlah 12 laporan, laporan triwulan disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan triwulan sejumlah 4 laporan, laporan semester disusun dalam bentuk buku dan untuk

digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan semester sejumlah 2 laporan dan untuk laporan tahunan ini disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan tahunan Satker dan disusun dalam bentuk Laporan Tahunan dengan jumlah 1 laporan.

**Maksud** Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan) adalah memonitor perkembangan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah direncanakan dalam POK. **Tujuannya** dari kegiatan ini adalah mencatat pelaksanaan (progres) kegiatan Satker sesuai dengan format laporan, bulanan, triwulan dan semester dan hasil laporan triwulan tersebut dilaporkan berjenjang ke Sekbandan P2SDM dan Biro Perencanaan Setjen untuk dilanjutkan ke Bappenas (sebagai laporan Satuan Kerja Tahun berjalan). **Output** kegiatan ini yaitu tersusunnya laporan satker (bulanan, triwulan, semester, tahunan). Sedangkan **outcome** dari kegiatan ini yaitu tertibnya penyusunan laporan kegiatan Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2017.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 58.110.000,- terealisasi keuangan Rp 58.101.000,- atau 99,98 % dengan target fisik 18 laporan dengan capaian realisasi fisik 18 laporan atau fisik 100%.

## 19. Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar LKj Pusat Penyuluhan Tahun 2016 memuat uraian tentang Struktur Organisasi, Perencanaan Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, dan Lampiran.

Rincian capaian kinerja kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2016 per IKK baik keuangan maupun fisiknya dijelaskan, sbb :

- a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, dari pagu anggaran Rp.13.619.928.000,- terealisasi Rp.12.371.392.592,- (88,85%) dengan rencana target fisik 450 unit KTH terealisasi 450 unit KTH (100%). Nilai capaian kinerja 100 % dan Efisiensi 1,13 artinya output yang direncanakan dengan target sudah tercapai.

- b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk dengan pagu anggaran Rp. 1.097.720.000,- terealisasi Rp.1.095.841.900,- (99,83%) dengan rencana fisik 22 unit koperasi terealisasi 24 unit koperasi (109,09%). Nilai capaian kinerja 109,09 % dan Efisiensi 1,09 artinya output yang dicapai sudah sesuai target.
- c. Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) dengan pagu anggaran Rp.1.800.555.000,- terealisasi Rp.1.791.703.030,- (99,51%) dengan rencana target fisik 15 unit LP2UKS terealisasi 17 unit LP2UKS (113,33%). Nilai capaian kinerja 113,33 % dan Efisiensi 1,14 artinya output yang direncanakan dengan target sudah tercapai.
- d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan dengan pagu anggaran Rp.1.728.850.000,- terealisasi Rp.1.728.227.950,- (99,6%) dengan rencana fisik 450 orang terealisasi 450 orang (100%). Nilai capaian kinerja 100 % dan Efisiensi 1,00 artinya output yang direncanakan dengan target sudah tercapai.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh pencapaian sasaran terhadap IKK kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2016 adalah sebesar 105,61% dari target 100%, dengan hasil, sbb; Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian rencana dan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan tahun 2016. Secara keseluruhan hasil kegiatan pusat penyuluhan dengan pagu total Rp. 18.247.053.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.717.166.472,- atau 91,62%. Rasio efisiensi capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2016 sebesar 1,21. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan telah efisien dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Rasio efektivitas capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2016 sebesar 1,09. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan tahun 2016 efektif.

**Output** kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016. Sedangkan **outcome** dari kegiatan ini yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun yang akan datang.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 41.460.000,- terealisasi keuangan Rp 41.326.000,- atau 99,68 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.



## 20. Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi

**Maksud dan tujuan** Pembinaan Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Membangun motivasi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Menjalin kerjasama, meningkatkan silaturahmi dan menumbuhkan keterpaduan sikap dan semangat seluruh jajaran pegawai Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai mencapai tujuan organisasi.
3. Membangun Etos Kerja kepada seluruh pegawai supaya nantinya dapat menerapkan konsep revolusi mental dengan memiliki kejujuran, etos kerja, disiplin dan berintegritas.

**Output** : terselenggaranya pembinaan pegawai Pusat Penyuluhan. **Outcome** kegiatan ini yaitu meningkatnya motivasi dan kinerja pegawai lingkup Pusat Penyuluhan



Gambar 30. Kegiatan Penanaman di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas



Gambar 31. Wisata Small World Purwokerto



Gambar 32. Pemberian Motivasi



Gambar 33. Kegiatan Outbond Palawi

Kegiatan Pembinaan Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 30 s.d 31 Maret 2017 bertempat di Purwokerto Provinsi Jawa

Tengah yang diikuti sebanyak 69 orang, dengan rincian Pusat Penyuluhan 49 orang dan Pegawai BPH Wilayah VI Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah sebanyak 20 Orang

Tabel 18. Jadwal kegiatan Pembinaan Pegawai Pusat Penyuluhan

Waktu	Judul Materi	Narasumber	Keterangan
== Hari Pertama tanggal 30 Maret 2017 ==			
07.00-	Peserta kumpul di Stasiun Gambir	Panitia	Menggunakan kaos biru dongker/penanaman Batam/kaos lain sewarna
08.00-12.50	- Doá -Perjalanan Jakarta-Purwokerto menggunakan kereta api Eksekutif Argo Lawu	Panitia	Sarapan pagi, snack dan makan siang disiapkan panitia
13.00-13.20	SHOLAT ZUHUR		
13.30-14.15	Perjalanan menuju Penanaman	Panitia	Snack disiapkan panitia
14.15-15.00	Penanaman di Desa Melung	Panitia	Menggunakan Kaos Penanaman warna kuning
15.00-15.20	Menuju Tempat Wisata Small World	Panitia	
15.20-16.30	Wisata Small World	Panitia	
16.30-17.00	Perjalanan menuju Hotel Meotel	Panitia	
17.00-18.30	ISHOMA		
19.00-19.05	Pembukaan	MC	Menggunakan pakaian batik
19.05-19.10	Doa	Denni Rasyid, SE, M.Si	
19.10-19.15	Laporan Ketua Panitia	Kabid.Pengembangan	
19.15-19.25	Arahan Kepala Pusat Penyuluhan	Kepala Pusat	
19.25-19.35	Sambutan dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI Purwokerto	Kepala Balai	
19.35-21.00	Motivasi	Analisa Widyaningrum, MPsi, P.Si	
21.00-Selesai	Hiburan	Panitia	
== Hari kedua tanggal 31 Maret 2017 ==			
05.30-06.00	<i>Breakfast</i>	Panitia ,hotel	
06.30-07.00	Menuju Outbond Palawi	Panitia	
07.00-10.00	Outbond Fun Games	Team Palawi	Menggunakan kaos abu-abu hijau
10.00-10.30	Menuju Hotel Meotel	Panitia	
10.30-13.00	ISHOMA,CHECK OUT HOTEL	Panitia	
13.00-13.30	Menuju Tempat Oleh-oleh	Panitia	
13.30-14.30	Oleh-oleh khas Purwokerto	Panitia	
14.30-15.00	Menuju Stasiun Purwokerto	Panitia	
16.00-selesai	Kembali Ke Jakarta	Panitia	

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 170.855.000,- terealisasi keuangan Rp 170.823.000,- atau 99,98 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## 21. Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan (Penyusunan Design SPIP)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Pusat Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset barang milik negara (BMN), serta ketaatan sesuai dengan semangat dan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pedoman untuk instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Pusat Penyuluhan perlu adanya pengintegrasian antar unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengaturan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan agar dapat dengan mudah dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi kelancaran penyelenggaraannya.

**Maksud** dari disusunnya desain SPIP adalah untuk memberi gambaran pelaksanaan SPIP di lingkup Pusat Penyuluhan sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan desain SPIP tersebut. **Tujuan** pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup Pusat Penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui keefektifan dari SOP yang disusun dalam meminimalisir faktor-faktor risiko sebuah kegiatan.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendala yang masih ada di dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
3. Menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

**Output** : tersusunnya laporan monev penyuluhan (penyusunan design SPIP). **Outcome** kegiatan ini yaitu keefektifan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Penyuluhan.

Desain SPIP Pusat Penyuluhan Tahun 2017 ini mencakup 3 Bidang yaitu Bidang Pengembangan Penyuluhan, Ketenagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluhan. Dari ketiga bidang tersebut diidentifikasi 3 kegiatan yang memiliki risiko signifikan sebanyak 12 risiko. Semua risiko yang teridentifikasi tersebut dikendalikan dengan membuat SOP pengendalian pada masing-masing risiko.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 300.600.000,- terealisasi keuangan Rp 300.112.891,- atau 99,84 % dengan target fisik 1 dokumen dengan capaian realisasi fisik 1 dokumen atau fisik 100%.

## 22. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi

Salah satu upaya penguatan kelembagaan masyarakat adalah melalui penumbuhkembangan Koperasi Kelompok Tani Hutan. Melalui fasilitasi pembentukan Koperasi tersebut diharapkan terbentuk Koperasi-Koperasi yang baik dan berdaya saing dengan perkembangan kemajuan zaman. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan dan kemandirian KTH, khususnya dalam pengembangan usaha, akses informasi, pemasaran dan lainnya.

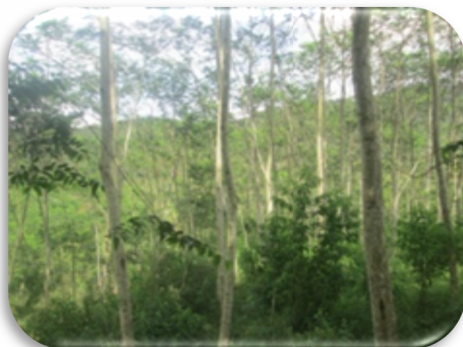
**Maksud** dilakukan fasilitasi pembentukan koperasi KTH yaitu sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan agar produktif dan mandiri serta dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Adapun **tujuannya** antara lain untuk meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat yang kuat dan mandiri dalam meningkatkan pendapatan, membantu pelaku utama (petani) dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, profuktif, dan menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Pada tahun 2017 telah terbentuk sebanyak 10 unit koperasi KTH sebagaimana Tabel 19.

Tabel 19. Rincian Pembentukan Koperasi KTH Tahun 2017

No	Nama KTH	Alamat	Ketua Kelompok	Penyuluh Pendamping	Jenis Kegiatan /Usaha
1	KTH Karya Bersama	Dsn. Coppeng Coppeng, Ds. Soga, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan	Agusrianto	Idris	anyaman bambu
2	KTH Tani Makmur	Ds. Cidadap, Kec. Campaka, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat	H. Budiman	Tulus, SP, MP	hutan rakyat, kapolaga, sayuran
3	KTH Margo Mulyo	Ds. Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur	Hariyanto	Nurhayadi, SP	HR, lebah madu, kambing etawa, home industri kripik, Sabun kecantikan dan madu, kapulaga, batik tulis
4	Gapoktan Puncak Semaring	Dusun Blumbang Utara, Ds. Mekar sari, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB	Ujip	Rusmin, SP	lebah madu, Madu dan MPTS

No	Nama KTH	Alamat	Ketua Kelompok	Penyuluh Pendamping	Jenis Kegiatan /Usaha
5	KTH Madusari	Dusun Ngrandu RT03/01 Katongan, Nglipar, Kab. Gunungkidul, Provinsi DIY	Sugeng Apriyanto	Sugeng Widodo	lebah madu, gula aren, pengolahan biogas, pengolahan empon-empon, wisata alam
6	KTH Hutan Mandiri	Ds. Padang Batung, Kec. Padang Batung, Kab Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan	Fahrudin	Pahlim, S.Hut	Budidaya lebah trigona
7	KTH HIPEC	Kp. Gardu Tanjak RT 03 RW 04 Kel.Pandeglang, Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Provinsi Banten	Ginanjari	Sumarno	madu trigona
8	KTH Pondok Madu	Dsn. Pondok Kaja, Ds. Gadungan, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, Provinsi Bali	I Nyoman Wika	I Made Wirya SP	budidaya lebah madu
9	KTH Karya Tani Sejahtera	Ds. Buana Sakti, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung	Purwadi	Tri Endah Anggraeni	HR, lebah madu, gula aren, pengelolaan biogas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro
10	KTH Alas Segoro	Ds. Punjul Harjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah	Mustofa	Sumanto	jasa wisata, pembibitan



Gambar 34.Hutan Rakyat di Desa Cidapad Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur



Gambar 35.Produk Propolis dari KTH HIPEC Kabupaten Pandeglang Banten

**Output** dari dana fasilitasi tersebut adalah pengesahan akta pendirian koperasi KTH oleh notaris dan Menteri Koperasi dan UKM. Adapun **Outcome** dari terbentuknya Koperasi KTH yaitu meningkatnya daya saing dan harga tawar produk KTH yang dapat meningkatkan ekonomi anggota melalui jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 462.090.000,- terealisasi keuangan Rp 461.820.625,- atau 99,94 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

### 23. Fasilitasi pembentukan LP2UKS

Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Prinsip pembentukan Wanawiyata Widyakarya adalah keswadayaan dan kemandirian.

**Maksud** dari kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat atau perorangan yang telah ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM kelompok, peningkatan sarana prasarana serta pengembangan usaha. Sedangkan **tujuannya** adalah :

1. Untuk memperkuat dan mengembangkan kelembagaan Wanawiyata Widyakarya yang telah ditetapkan menjadi kelompok yang lebih produktif dan mandiri.
2. Menyiapkan kelompok masyarakat sebagai tempat percontohan dan peningkatan kapasitas SDM kelompok untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pemagangan.



Gambar 36.LP2UKS LMDH Madu Sari Purbalingga



Gambar 37.Sarang lebah di LMDH Madu Sari Kabupaten Purbalingga

**Output** pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 yaitu terbentuknya unit-unit percontohan usaha dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup yang bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat luas. Sedangkan **outcomenya** yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat, dalam mengembangkan usaha dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat yang produktif dan mandiri dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup.

Tabel 20. Daftar LP2UKS Tahun 2017

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua Kelompok	Penyuluh Pendamping	Jenis Usaha
1	Gunung Ijo	Desa Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh	Nasrol AB (081269515633)	Elfian, S.Hut (085260012512)	Budidaya Sengon
2	Mutiara Hijau I	Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung	Samsudin (085269352826)	Joko Sungkowo (082373638423)	a. Budidaya Mangrove b. Budidaya Lebah madu
3	Assifa Babussalam	Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	Dadan Ramdan (08562096918)	Wiharsa (082217266893)	Budidaya Lebah Madu
4	Vina Sari	Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten	Iding Suhendi (087773782922)	Aming (087771942635)	Budidaya Jamur Tiram
5	LMDH Madu Sari	Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Dachuri, S.Pd (082326441999)	Sarwanto, SP 081391600877)	a. Budidaya Lebah madu b. Pengolahan Madu - Tepung sari - Royal Jelly - Propolis
6	Mudhotomo	Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta	Supari (081227753352)	Puniman, A.Md	a. Budidaya Sengon b. Pupuk Organik
7	Tani Makmur	Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten	Jali	Singgih Edi Kuncoro,	Budidaya Porang

		Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	(085746516115)	SP  (085259165918)	
8	UHD Bumdes (Usaha Hutan Desa BUMdes Patteneteang)	Desa Patteneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan	Hasdi  (085330793258)	M. Imran Zainal, S.Hut  (085804944090)	Budidaya Lebah Madu
9	Sejahtera Bersama Alam (SEJALAN)	Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat	Leonardus  (082350664608)	Felix Belawing, S.Hut  (081345633613)	Budidaya Aren dan Pengolahan paska panen
10	MPA Desa Rasau Jaya II	Desa Rasau Jaya II, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	Agus Riyanto  (085845296211)	Siti Masitoh, SP	Asap Cair/ Cuka Kayu
11	Tani Gaharu Lampung (TAGALA)*	Ds. Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung	Syamsul Hudha (08127935157)	Tri Endah Anggraeni, S.Hut  (085366263443)	Budidaya Gaharu - Pembibitan Gaharu - Inokulasi / Penyuntikan Gaharu - Pengolahan Gaharu
12	Enggal Mulyo Lestari*	Ds. Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur	Suparno, SH (0812162454412)	Hery Pramudya Wijaya, S.Hut  (081249922202)	a. Hutan Rakyat b. Jual beli kayu bersertifikat <i>Forest Stewardship Council</i>

Keterangan : \*) mandiri (ditetapkan Kabadan tetapi tidak difasilitasi Pusluh)

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 427.458.000,- terealisasi keuangan Rp 425.987.200,- atau 99,66 % dengan target fisik 10 unit (1 laporan) dengan capaian realisasi fisik 10 unit (1 laporan) atau fisik 100%.

## 24. Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 56 ditetapkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat maka pengelolaan yang profesional dalam menjamin pemanfaatannya yang berkesinambungan dan tetap lestari akan meningkatkan produktifitas kawasan hutan, untuk itu tindakan mengelola sangat dibutuhkan,



management pengelolaan hutan berdasarkan pada asas lestari, manfaat, berkelanjutan, transparan dan pengelolaan berbasis masyarakat.

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan ini, **dimaksudkan** :

1. Memperbaiki berbagai komponen kegiatan Penyuluh Kehutanan dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan yang dilakukan melalui pendampingan kegiatan antara lain : Pembangunan Hutan Rakyat (HR), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (PHPS) dan Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan (KTH).
2. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan produktifitas sumber daya manusia atau kinerja penyuluh kehutanan, sehingga pengembangan karier dan kesejahteraan Penyuluh Kehutanan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Terbentuknya Tenaga Pendamping Handal bagi KTH.

**Tujuan** Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan secara optimal.
2. Terbangunnya motivasi, peningkatan kinerja serta tercipta penyuluh kehutanan yang profesional.
3. Terbentuknya Tenaga Pendamping Handal bagi KTH sebanyak 450 orang.
4. Penempatan Penyuluh Kehutanan pada area kerja perhutanan sosial dan kebakaran hutan.
5. Diperoleh data-data KTH, Koperasi KTH, Sarana Prasarana Penyuluhan, Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM, PKS, dan lain-lain.



Gambar 38. Pembinaan Penyuluh di Muara Gembong



Gambar 39. Pembinaan Penyuluh di Kabupaten Probolinggo

**Output** dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah tenaga pendamping handal di sekitar hutan dalam pemberdayaan masyarakat 340 orang. Sedangkan **outcomenya** adalah peningkatan kapasitas penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Kehutanan Tahun 2017 telah terlaksana di 10 lokasi dengan rincian sebagaimana Tabel 21.

Tabel 11. Rincian pembinaan tenaga pendamping KTH

No	Lokasi	Jumlah Pendamping KTH
1	Provinsi Kalimantan Tengah	30
2	Provinsi Lampung	42
3	Provinsi Bengkulu	30
4	Provinsi Jawa Timur	31
5	Provinsi Jawa Barat	40
6	Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
7	Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	40
8	Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	30
9	Muara Gembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	23
10	Kab. Pematang, Provinsi Jawa Tengah	40
<b>Total</b>		<b>340</b>

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 1.277.400.000,- terealisasi keuangan Rp 1.276.862.959,- atau 99,96 % dengan target fisik 10 laporan dengan capaian realisasi fisik 10 laporan atau fisik 100%.

## 25. Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluh Kehutanan Lingkup Pusluh

Penyuluh Kehutanan memerlukan pengetahuan dalam membuat karya tulis yang baik sehingga perlu mempelajari model-model *Design, Photoshop, Layout* dan cara penulisan atau merangkai kata yang baik untuk membuat materi penyuluhan yang menarik untuk dibaca dan dipahami oleh Kelompok Tani Hutan yang menjadi sasaran penyuluhan.

Penyelenggaran peningkatan kapasitas ini **dimaksudkan** untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan produktifitas sumber daya manusia atau kinerja penyuluh kehutanan, sehingga pengembangan karier Penyuluh Kehutanan dapat dilaksanakan secara optimal

2. Penyuluh Kehutanan merupakan vasilitator, edukator, motivator dan sebagai akses yang menyambungkan informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat sasaran.
3. Memberi pembekalan kepada Penyuluh Kehutanan agar lebih berinovatif dalam membuat materi-materi penyuluhan sehingga bisa diakses oleh masyarakat sasaran.

**Tujuan** Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Penyuluh Kehutanan :

1. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan secara optimal.
2. Terbangunnya motivasi, peningkatan kinerja serta tercipta penyuluh kehutanan yang profesional.
3. Penyuluh Kehutanan dapat memahami kebijakan-kebijakan serta kegiatan Eselon I lain yang sedang berajalan di Kementerian LHK.
4. Mempelajari model-model *Design, Photoshop, Layout* dan cara penulisan atau merangkai kata yang baik.

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dilaksanakan di Ruang Rapat BP2SDM Blok VII Lantai 8, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Metoda pengajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, simulasi, tanya jawab dan praktek. Materi yang diberikan sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Materi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Ahli 2017

No.	Materi	Narasumber	Moderator	Pembahas
1.	Peran Penyuluh Kehutanan dalam Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Ir. Niniek Irawati,	Rusmalia, S.Hut	- Ir. Endang Dwi Hastuti, MM
2.	Peran Penyuluh Kehutanan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial dan Hutan Adat	Ir. Hargyono, MSc		- Budi Budiman, S.Hut., M.Si
3.	Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak	Ir. Teguh Widodo, M.Si	Indri Pujirianti, S.Hut, M.Si	- Murtado, S.Hut., MP - Akhmad Riyadi, SP., MM - Eli Sugianto, S.Hut
4.	Peran Penyuluh Kehutanan dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Program Kampung Iklim	Dra. Sri Tantri Arundhati, MSc	Nden Rissa Hadikusuma, S.Si, M.Si	- Ir. Rita Marsih - DR. Ir. Yumi M.Si - Indri Pujirianti, S.Hut, M.Si
5.	Desain Layout dan teknik desain yang baik	Aulia Erlangga	Dr. Ir. Yumi M.Si	

Fasilitator yang menyampaikan materi dalam peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan terdiri dari:

1. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
2. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
5. National Geographic.

Tabel 23. Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Ahli 2017

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Alwis, MM;	Penyuluh Kehutanan Madya
2.	Ir. Ryke LS, Siswari;	Penyuluh Kehutanan Madya
3.	Ir. Endang Dwi Hastuti, MM;	Penyuluh Kehutanan Madya
4.	Murtado S.Hut, MP;	Penyuluh Kehutanan Madya
5.	Dr. Ir. Yumi M.Si;	Penyuluh Kehutanan Madya
6.	Ir. Rita Marsi;	Penyuluh Kehutanan Madya
7.	Ir. Victor Winarto, ME;	Penyuluh Kehutanan Madya
8.	Akhmad Riyadi, SP, MM;	Penyuluh Kehutanan Madya
9.	Siwi Tri Utami, S.Hut;	Penyuluh Kehutanan Muda
10.	Ernita Mery Thersia S.Hut;	Penyuluh Kehutanan Muda
11.	Firmansyah, S.Hut, M.Sc;	Penyuluh Kehutanan Muda
12.	Budi Budiman, S.Hut, M.Sc;	Penyuluh Kehutanan Muda
13.	Eli Sugianto, S.Hut, M.Si;	Penyuluh Kehutanan Pertama
14.	Nden Rissa Hadikusumah, S.Si, M.Si;	Penyuluh Kehutanan Pertama
15.	Rusmalia, S.Hut;	Penyuluh Kehutanan Pertama



Gambar 40. Sesi Penyampaian Materi



Gambar 41. Praktek Penyusunan Desain Layout

**Output** dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas teknis penyuluh kehutanan lingkup Pusluh. Sedangkan **outcomenya** adalah Penyuluh Kehutanan di Pusat Penyuluhan bisa lebih memotivasi diri untuk menjadikan potensi diri lebih baik.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 49.250.000,- terealisasi keuangan Rp 49.250.000,- atau 100 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

## **26. Layanan Perkantoran.**

Kegiatan layanan perkantoran memuat operasional dan pemeliharaan kantor terdiri atas pemeliharaan peralatan perkantoran, perawatan kendaraan bermotor roda 4, perawatan kendaraan bermotor roda 2, operasional perkantoran (biaya pengiriman, laminasi, kearsipan, biaya pegawai harian, honor pengelola keuangan).

**Output** : terlaksananya kegiatan perkantoran Pusluh. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan perkantoran.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 1.200.000.000,- terealisasi keuangan Rp 1.195.644.405,- atau 99,64 % dengan target fisik 12 bulan dengan capaian realisasi fisik 12 bulan atau fisik 100%.

## **C. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut**

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah kegiatan peningkatan penyuluhan diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan kenaikan kelas KTH (Permenhut P.57/Menhut-II/2014) oleh daerah belum diacu secara optimal.
2. Kurangnya koordinasi antara pengelola dekonsentrasi provinsi dengan eselon I sebagai penanggung jawab teknis kegiatan sehingga kegiatan peningkatan kelas KTH tidak termonitor baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan;
3. Belum adanya data yang terintegrasi yaitu data penyuluh kehutanan dengan KTH binaannya yang meliputi kelas KTH, komoditas/kegiatan/usaha KTH yang setiap saat dapat diakses dan diperbaharui oleh penyuluh kehutanan;
4. Pembuatan akta notaris dan pengesahan akta pendirian koperasi memerlukan waktu yang lama (minimal  $\pm$  3 bulan), sehingga akta pendirian koperasi tidak dapat selesai secara bersamaan;
5. Sarana dan prasarana kelompok untuk mendukung kegiatan LP2UKS/wanawiyata widyakarya dan pemagangan masih kurang;

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan adalah:

1. Perlu dibuat petunjuk Kapus yang mengatur tentang seleksi, penetapan dan evaluasi penerima fasilitasi kenaikan kelas KTH.
2. Melakukan koordinasi dengan pelaksana penyuluhan daerah/provinsi untuk dapat menganggarkan kegiatan peningkatan penyuluhan pada anggaran daerah/APBD, sesuai dengan amanat Permenhut nomor P.57/Menhut-II/2015 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
3. Melakukan perbaikan pada SIMLUH untuk mengintegrasikan data penyuluh pendamping dengan KTH binaan dan mendorong penyuluh pendamping agar memperbaharui data KTH binaannya;
4. Mendorong penyuluh pendamping KTH untuk mendampingi secara intensif pembentukan koperasi dan melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta dalam persyaratan pemilihan KTH yang akan mendapat fasilitasi koperasi adalah KTH yang sudah berkembang dan membentuk koperasi (belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM) agar proses pengesahan legalitas koperasi lebih cepat;
5. Pusat Penyuluhan mendorong pelaksana penyuluhan daerah/provinsi agar dapat mendukung kegiatan LP2UKS melalui anggaran daerah/APBD untuk meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan di LP2UKS.

#### **D. Rekomendasi**

1. Membuat petunjuk Kapus yang mengatur tentang seleksi, penetapan dan evaluasi penerima fasilitasi kenaikan kelas KTH (turunan Perkabupaten P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017).
2. Setiap penyuluh kehutanan pusat dan daerah harus mempunyai data KTH yang terintegrasi meliputi kelas KTH, komoditas/kegiatan/usaha KTH.
3. Dalam persyaratan pemilihan KTH yang akan mendapat fasilitasi koperasi adalah KTH yang sudah berkembang dan membentuk koperasi (belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM) agar proses pengesahan legalitas koperasi lebih cepat.

## **BAB V. PENUTUP**

Seluruh kegiatan Pusat Penyuluhan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan tata waktu yang tertuang dalam POK. Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Penyuluhan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.8.350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.331.923.673,- atau sebesar 99,78%.

Capaian kinerja pada tahun 2017 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik.